



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA




# LMCK

LAPORAN MONITORING  
CAPAIAN KINERJA  
TRIWULAN IV

2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA

 [bptd24malut](https://www.facebook.com/bptd24malut)

 [bptdmalut](https://www.instagram.com/bptdmalut)

 [hubdat.bptdmalut@gmail.com](mailto:hubdat.bptdmalut@gmail.com)

## ▶▶▶ Daftar Isi

### HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

### KATA PENGANTAR

### RINGKASAN EKSEKUTIF

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### DAFTAR GAMBAR

### DAFTAR LAMPIRAN

## Bab I PENDAHULUAN

I.1	Latar Belakang	I-
I.2	Tugas Pokok dan Fungsi	I-
	I.2.1 Bagan Struktur Organisasi	I-
I.3	Sumber Daya Manusia	I-
I.4	Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-
I.5	Sistematika Laporan	I-
I.6	Uraian Singkat Perencanaan Strategis	I-
	I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	I-
I.7	Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	I-

## Bab II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1	Tahapan Pengukuran Kinerja	II-
2.2	Pengukuran Capaian Kinerja	II-
A.	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 1.1	Persentase Keberintisan Angkutan Jalan	
	a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	II-
	a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-
	a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	II-
	a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....	II-
IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keberintisan Angkutan Penyeberangan	
	a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	II-
	a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-
	a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	II-
	a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....	II-
IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	
	a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	II-
	a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-
	a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	II-
	a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....	II-

B. SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	II-
IKK2.3 Persentase Pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	
a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	II-
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	II-
a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....	II-
C. SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	
IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang terhadap Kondisi Ideal	
a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	II-
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	II-
a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....	II-
IKK3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	
a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....	II-
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	II-
a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....	II-
IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	II-
a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	III-
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	II-
a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....	II-
IKK7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	
a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	II-
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	II-
a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....	II-
D. SK4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	
IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	
a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	II-
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	II-
a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....	II-

E. SK5 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	
IKK5.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	
a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	II-
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan	II-
a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....	II-
2.3 Realisasi Anggaran	II-
2.3.1. Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2024	II-
a.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024	II-
a.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024	II-
a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran	II-
2.3.2 Refocusing Anggaran Tahun 2024	II-
a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024	II-
a.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024	II-
a.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024	II-
a.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Ta. 2024	II-
2.3.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2024	II-
2.4 Realisasi Anggaran Tahun 2024	II-
2.4.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Ta 2024	II-
2.4.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024	II-
2.4.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024	II-
2.4.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	II-
2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-
2.6 Hambatan dan Kendala	II-

### **Bab III PENUTUP**

3.1 Penutup	III-
3.1.2 Ringkasan Capaian .....	III-
3.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab .....	III-

### **Lampiran**

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Rencana Aksi Tahun 2024
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024
5. Lain lain yang dianggap perlu

# KATA PENGANTAR

---



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Ternate, 10 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas II Maluku Utara



Joko Kusnanto, ST, M.Sc

NIP. 197811152006041001



## Ringkasan Eksekutif

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019- 2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Renstra memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat



4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
5. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara sudah baik.

Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara tahun 2024, terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ( $IKP \geq 100\%$ ) dan tidak ada Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ( $0\% \leq IKP < 100\%$ ). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 100%;
2. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 100% ;
3. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 100% ;
4. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 100%;
5. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% ;
6. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 100% ;
7. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 100% ;



8. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 100% ;
9. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 100% ;
10. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 100% ;

dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesign sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. 1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, *Transparan*, *Akuntable*, *Efektif* dan *Efisien* sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

---



## **I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mempunyai 4 (empat) unit kerja Eselon IV, sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Prasarana Jalan SDP
3. Seksi Sarana dan Angkutan jalan, SDP
4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan.

### **1. Tugas**

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

### **2. Fungsi**

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;



3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan, sungai danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



### **Tipologi (BPTD) terdiri atas:**

- a. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III.

### **Susunan Organisasi BPTD**

- a. BPTD Kelas I;
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Bidang Prasarana;
  - c. Bidang Sarana dan Angkutan;
  - d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. BPTD Kelas II;
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Prasarana Transportasi Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. BPTD Kelas III.
  - a. Satuan Pelayanan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA**



Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan,



halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karosesi, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelayaklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

### **I. 3. Sumber Daya Manusia**

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara. Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi BPTD. Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara pada tahun 2024 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS)



sebanyak 100 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 10 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 72 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I. Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPTD Kelas II Maluku Utara

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		Total
		ASN	Non ASN	
1	Kepala BPTD	1		1
2	Subbagian Tata Usaha	13	21	34
3	Seksi Sarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	12	1	13
4	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	9	0	9
5	Seksi Prasarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	4	11
7	Satpel PP Daruba – Morotai	9	6	15
8	Satpel PP Weda	7	5	12
9	Wilker PP Patani	1	1	2
10	Wilker PP Gebe	3	2	5
11	Satpel PP Tobelo	4	2	6
12	Wilker PP Subaim	1	0	1
13	Satpel PP Bastiong	13	6	19
14	Wilker PP Rum	5	4	9
15	Wilker PP Moti	1	1	2
16	Wilker PP Batang Dua	0	0	0
17	Satpel PP Sofifi	10	3	13
18	Wilker PP Sidangole	3	3	6
19	Wilker PP Dowora	1	1	2
20	Satpel PP Babang	2	1	3
21	Wilker PP Obi	1	1	2
22	Wilker PP Saketa	1	1	2
23	Wilker PP Kayoa	1	1	2
24	Wilker PP Makian	0	1	1
25	Satpel PP Sanana	1	1	2
26	Wilker PP Mangole	1	1	2
27	Wilker PP Bobong	1	1	2
28	Kapal Patroli KN.P 3.24	4	5	9
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>110</b>	<b>72</b>	<b>182</b>



## **I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan**

### **1. Kewenangan**

#### *a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);

#### *b. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

#### *c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

#### *d. PM No. 122 Tahun 2018*

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

### **2. Anggaran**

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara usulan pagu kebutuhan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.



### **3. Isu Strategis**

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara adalah

- a. Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan;
- b. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
- c. Penataan dan pembinaan SDM Transportasi Darat;
- d. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
- e. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
- f. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

### **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2024:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

#### **I. 5. Sistematika Laporan**

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tugas Pokok dan Fungsi
  - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- II.2. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024



II.3. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

II.4. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024

II.5. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024

II.6. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2024

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

III.2.1 SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan

III.2.1.1 IKK 1.1 Persentase pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

Nasional

A.1 Definisi Indikator Kinerja

A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.2.1.2 IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

A.1 Definisi Indikator Kinerja

A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.2.1.3 IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

A.1 Definisi Indikator Kinerja

A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang



### III.2.2 SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat

#### III.2.2.1 IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

### III.2.3 SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

#### III.2.3.1 IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

#### III.2.3.2 IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan Transportasi Jalan

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang



### III.3.3.3 IKK 7.a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

### III.3.3.4 IKK 7.b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

### III.2.4 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

#### III.2.4.1 IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

### III.2.5 SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

#### III.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- A.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024



### A.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

### A.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

## III.3 Realisasi Anggaran

### III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Refocusing Anggaran Tahun 2024
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 - 2024

### III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

### III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### III.3.4. Hambatan dan Kendala

## BAB IV PENUTUP

### IV.1 Penutup

#### IV.1.1 Ringkasan Capaian

### IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

#### Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024;



5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2024;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024;
8. Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2024;
9. Revisi Rencana Aksi III Tahun 2024;
10. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;
11. Lain – lain yang dianggap perlu.

## III.1

# TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.







### III. 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.



## Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

### Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$



## **Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2024**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Maluku Utara 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.



### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan perbandingan antara target perjanjian kinerja dengan capaian kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara maka diperoleh data Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun adalah sebesar 99%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran Kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2024

Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	TW I			TW II			TW III			TW IV		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
<b>SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda</b>						<b>45</b>			<b>50,6</b>			<b>88</b>			<b>100</b>
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan nasional	%	90	90	21,9	21,9%	90	48,56	48,56%	90	79,9	79,9%	90	90	100%
IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	21	21%	100	38	38%	100	84	84%	100	100	100%
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	20	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%
<b>SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat</b>						<b>0</b>			<b>100</b>			<b>100</b>			<b>100</b>
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	0	0	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
<b>SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat</b>						<b>56</b>			<b>75</b>			<b>100%</b>			<b>100%</b>
IKK 3.1	Persentase Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	73	73%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi	Orang	100	0	0	0	100	0	0	100	100	100%	100	100	100%
IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	100	50	0%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
IKK7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP	Lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
<b>SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat</b>						<b>100%</b>			<b>100%</b>			<b>100%</b>			<b>100%</b>
IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	100%	90	100%	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%



Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	TW I			TW II			TW III			TW IV		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						100%			100%			100%			100%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						60%	87,11%			97%			100%		
Rata – Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						56%	78,17%			96%			100%		
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP ≥ 100%)						4	7			8			10		
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0 ≤ IKP < 100%)						6	3			2			10		



Selama tahun 2023, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 10 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Program adalah sebagai berikut:

***Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi***

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional
2. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
3. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi



## IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

### a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan nasional adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

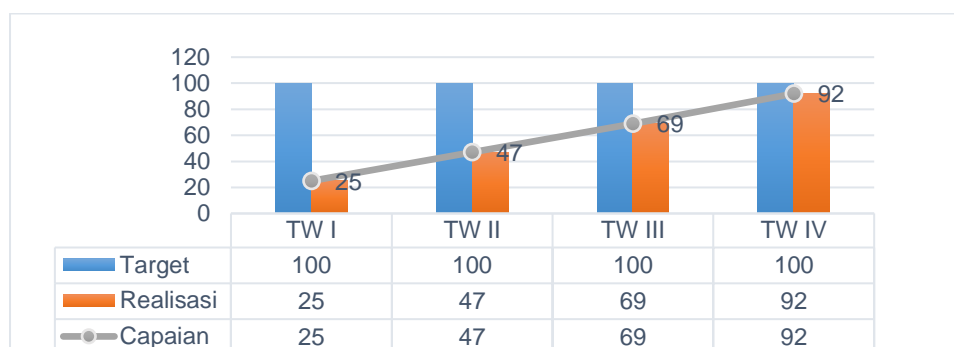
Untuk menghitung Indikator Kinerja Pelaksanaan Keperintisan angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Maluku Utara Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional triwulan IV sebesar 92% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 92%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.

Grafik.1 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2023



### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### • Dasar Hukum

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8613 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Jalan Perintis Tahun 2023, terdapat sebanyak 15 trayek yang di tetapkan



di provinsi maluku utara untuk di layani oleh keperintisan angkutan jalan nsional sebagaimana terdapat pada **LAMPIRAN**.

NO	RUTE	TARGET TRIP 1 TAHUN	
		SEBELUM ADDENDUM	SETELAH ADDENDUM
1	Malifut - Kao - Toliwang	576	774
2	Tobelo - Galela - Saluta	1.152	910
3	Tobelo-Loleba	576	680
4	Pasar Fogi - Pelabuhan Ferry Sanana - Pasar Fogi	1.152	916
5	Weda – Saketa	576	537
6	Sofifi - Jalan Km 40 - Kantor Gubernur - Sofifi	1.728	1.214
7	Wayabula - Daruba - Bere Bere - Sopi	576	544
8	Weda – Patani	1.152	1.390
9	Plb. Penyebrangan Rum - Terminal Sarimalaha	1.152	696
10	Bibinoi - Babang - Wayaua	576	448
11	Belang Belang - Labuha - Kubung	576	462
12	Terminal Trans Goal - Terminal Jailolo - Desa Susupu	1.152	1.030
13	Iga – Subaim	576	426
14	Terminal Fog - Manaf	1.152	834
15	Tobelo - Trans Sukamaju	1.152	1.171

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum;





3. Angkutan keberintisan menjadi salah satu pilihan transportasi yang murah;

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keberintisan;
3. Kendala dalam mendapatkan BBM Bersubsidi karena kelangkaan di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi.

- **Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Pelaksanaan Keberintisan angkutan Jalan Nasional digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan nasional Tahun 2023 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam pelayanan. Capaian rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	RUTE	TARGET		REALISASI		PROSENTASE PENCAPAIAN	
		Rit	Pnp	Rit	Pnp	Rit	Pnp
1	MALIFUT - KAO - TOLIWANG	520	3.456	486	929	93%	27%
2	TOBELO - GALELA - SALUTA	1.152	5.760	1.198	2.883	104%	50%
3	TOBELO-LOLEBA	576	2.880	587	2.545	102%	88%
4	PASAR FOGI - PELABUHAN FERRY SANANA - PASAR FOGI	956	5.760	820	540	86%	9%
5	WEDA - SAKETA	520	2.880	490	1.291	94%	45%
6	SOFIFI - JALAN KM 40 - KANTOR GUBERNUR - SOFIFI	1.728	10.368	1.774	2.208	103%	21%





7	WAYABULA - DARUBA - BERE BERE - SOPI	576	2.880	600	2.728	104%	95%
8	WEDA - PATANI	1.110	5.760	1.070	1.686	96%	29%
9	PLB. PENYEBRANGAN RUM - TERMINAL SARIMALAHA	872	5.760	696	1.086	80%	19%
10	BIBINOI - BABANG - WAYAU	506	2.304	450	1.105	89%	48%
11	BELANG BELANG - LABUHA - KUBUNG	520	2.304	462	1.238	89%	54%
12	TERMINAL TRANS GOAL - TERMINAL JAILOLO - DESA SUSUPU	1.082	4.608	1.038	2.598	96%	56%
13	IGA - SUBAIM	492	2.304	426	930	87%	40%
14	TERMINAL FOG - MANAF	956	4.608	838	582	88%	13%
15	TOBELO - TRANS SUKAMAJU	1.152	4.608	1.180	2.648	102%	57%
		12.718	66.240	12.115	24.997	92%	38%

Terdapat realisasi pelayanan sampai dengan Triwulan IV sebesar 12.115 Rit dengan target pelayanan selama setahun sebesar 12.718 Rit. Maka,

$$IKK 1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Triwulan IV} = \frac{12.115}{12.718} = 0,92$$

Dari data realisasi operasional pelayanan angkutan jalan diatas maka dapat di hitung capaian indikator kegiatan, sebagai berikut:

*Capaian Persentase Layanan Keperintisan Angkutan Jalan*

$$= \frac{0,92}{100} * 100\% = 92\%$$

#### • Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2023 yaitu Angkutan Jalan Perintis ( Prioritas Nasional) Subsidi Oprasional Bus Perintis senilai Rp. 8.489.832.000 dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2023 Rp8.483.568.243 atau mencapai 99,9%.

#### a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Maluku Utara dengan memperhatikan





- RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan.
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum.
  3. Dapat terus Mewujudkan Konektifitas, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.
  4. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal.
  5. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum.

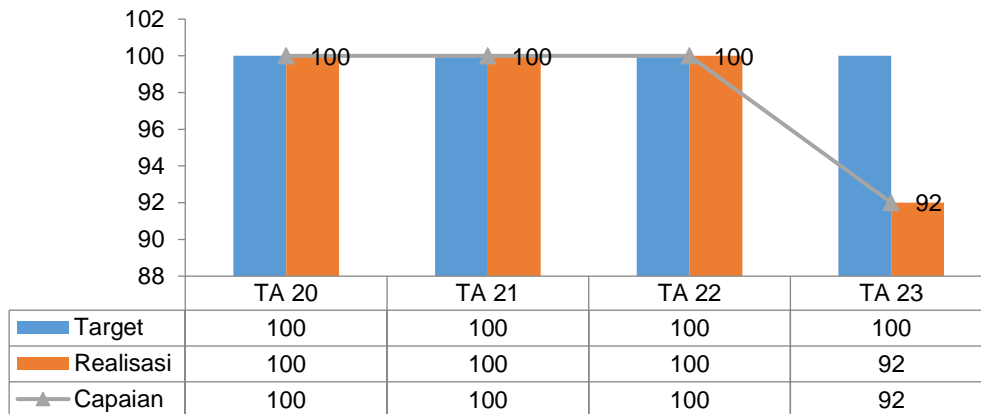
#### **a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.**

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2023 sebesar 92% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 92% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020, 2021, dan 2022 capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 100% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020, 2021,2022 lebih besar dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023. Untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021,2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	IKK	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/ Turun
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi														
1	IKK 1.1	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	92	92%	Turun

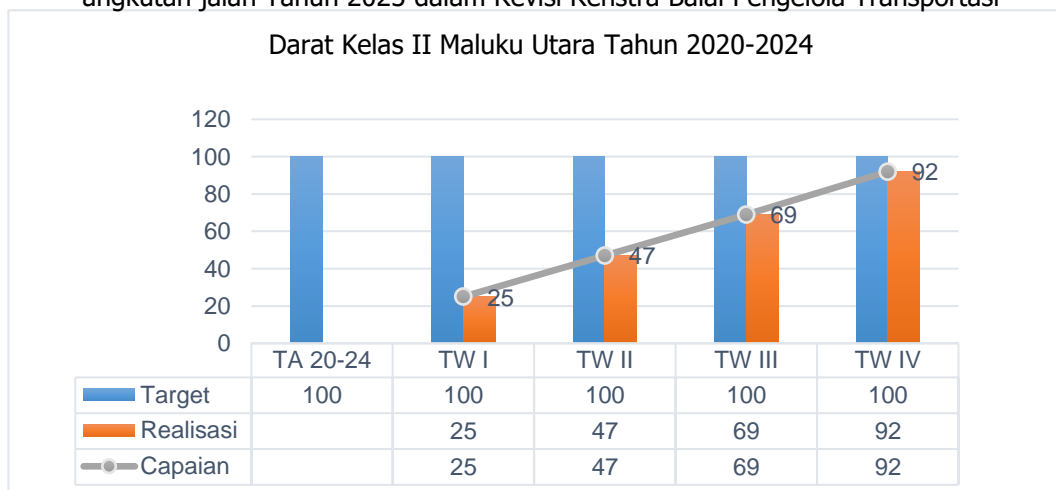




**a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.**

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2023 sebesar 92% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 92%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 2.** Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Gambar III.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi



## IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

### a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

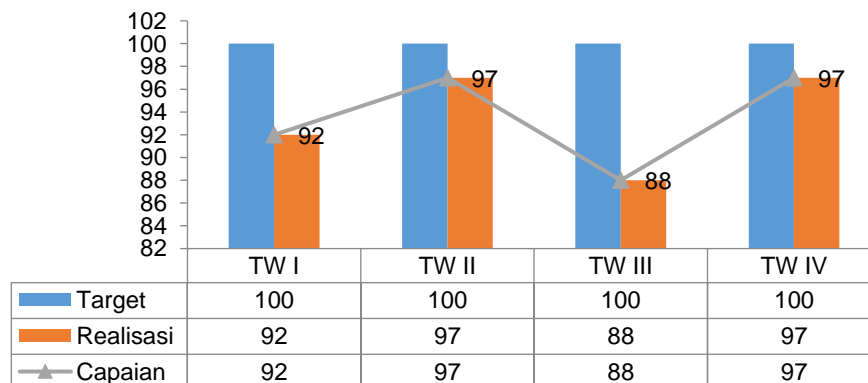
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.5 = \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$$

### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2023 sebesar 97% jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 97%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.3** Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.

Gambar III.3 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan





### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 9496 Tahun 2022 tanggal 21 November 2022 Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023, sebanyak 21 lintasan perintis yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Penyeberangan Perintis di wilayah Maluku Utara. Dari jumlah lintas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) lintas penyeberangan yang terlayani Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran** .

NO	Nama Lintasan	Target Setahun	Satuan
1	Tobelo – Subaim	440	Trip
2	Daruba – Zum-zum	156	Trip
3	Daruba – Kolorai	156	Trip
4	Daruba – Dodola	156	Trip
5	Bastiong – Batang Dua	44	Trip
6	Bastiong - Moti	236	Trip
7	Moti – Makian	236	Trip
8	Makian - Kayoa	236	Trip
9	Kayoa – Babang	236	Trip
10	Babang – Saketa	390	Trip
11	Kupal – Kasiruta	190	Trip
12	Kasiruta - Boso	190	Trip
13	Kupal - Mandioli	96	Trip
14	Dowora - Sofifi	285	Trip
15	Babang Madopolo	92	Trip
16	Madopolo – Obi	92	Trip
17	Obi – Sanana	92	Trip
18	Sanana – Mangole	276	Trip
19	Mangole – Bobong	92	Trip
Total		3691	

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan memiliki target 100% yang





diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Realisasi Kinerja**

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan jumlah total pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK 1.5 = \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat
2. Jalur yang dilayani memang untuk masyarakat yang terisolir
3. Kepastian jam operasioanal Keperintisan Angkutan Penyeberangan

- **Faktor Kendala**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Kondisi cuaca yang tidak menentu disuatu daerah yang menyebabkan pelayanan Kapal Penyeberangan tidak optimal;
2. Jadwal Oprasional tidak Terlalu banyak
3. Tidak terpenuhinya beberapa lintasan oleh Kapal Penyeberangan menyebabkan perekonomian di suatu daerah menjadi terhambat.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan.





NO	Nama Lintasan	Target Setahun	Satuan	Total Capaian Januari s.d Desember
1	Tobelo – Subaim	440	Trip	440
2	Daruba – Zum-zum	156	Trip	154
3	Daruba – Kolorai	156	Trip	154
4	Daruba – Dodola	156	Trip	154
5	Bastiong – Batang Dua	44	Trip	38
6	Bastiong - Moti	236	Trip	232
7	Moti – Makian	236	Trip	232
8	Makian - Kayoa	236	Trip	232
9	Kayoa – Babang	236	Trip	233
10	Babang – Saketa	390	Trip	382
11	Kupal – Kasiruta	190	Trip	190
12	Kasiruta - Bosoa	190	Trip	190
13	Kupal - Mandioli	96	Trip	96
14	Dowora - Sofifi	285	Trip	292
15	Babang Madopolo	92	Trip	89
16	Madopolo – Obi	92	Trip	88
17	Obi – Sanana	92	Trip	90
18	Sanana – Mangole	276	Trip	273
19	Mangole – Bobong	92	Trip	89
Total		3691		3.648

Note:

Lintasan Weda-Patani dan Patani-Gebe adalah lintasan yang berada dalam Provinsi Maluku Utara namun pemberian Subsidiya masih di BPTD Kelas II Papua Barat (kontrak antara BPTD Kelas II Papua Barat dengan PT.ASDP Cabang Sorong).

Capaian pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan sampai dengan Tahun 2023 sebesar 3.648 trip dengan target pelaksanaan sebesar 3691 trip.

Dari data realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan diatas maka dapat di hitung capaian indikator kegiatan, sebagai berikut:

$$IKK 1.5 = \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Sehingga capaian kegiatan sebagai berikut.

$$IKK 1.5 = \frac{3648 \text{ Trip}}{3691 \text{ Trip}} \times 100\% = 97\%$$





Dengan demikian, keberhasilan capaian pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan Layanan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 97%:

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2023 yaitu Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan senilai Rp. 19.261.463.000 dengan realisasi di Tahun 2023 Rp. 19.256.154.757 atau mencapai 99,99%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan pada lintasan keperintisan angkutan penyeberangan;
2. Menambah armada pada lintas keperintisan angkutan penyeberangan;
3. Membuka lintasan di wilayah maluku utara yang masih terisolasi dan belum dijangkau oleh transportasi laut.

**a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022**

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2023 sebesar 97% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 97% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020, 2021 dan 2022 capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 100% dengan target 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 97%,

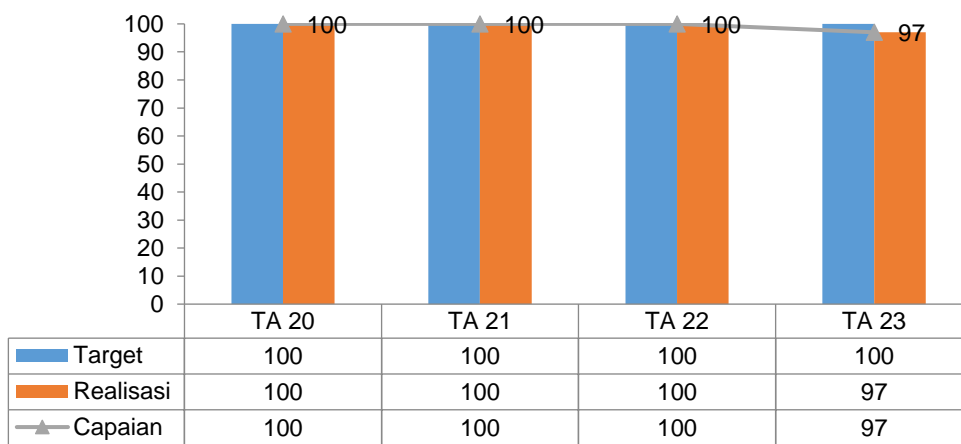




untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

No.	IKK	T 2020			T 2021			T 2022			T 2023			Naik/ Turun
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi														
1	IKK 1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	Turun

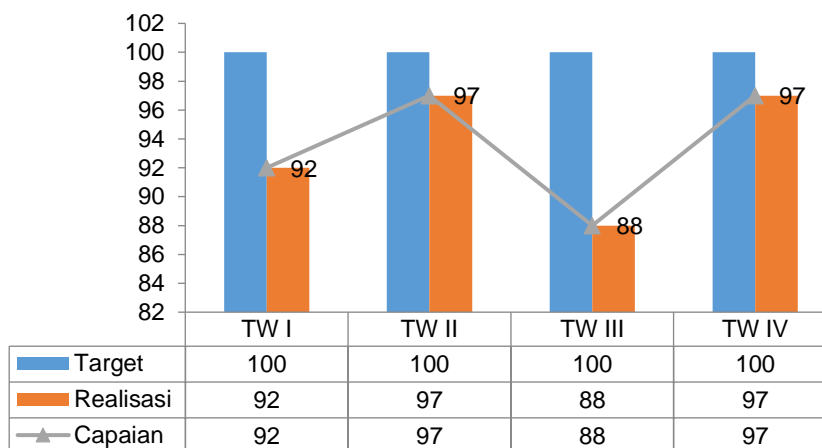


**a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2023 sebesar 97% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 97%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.4** Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.



Gambar III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024



## IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

### a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

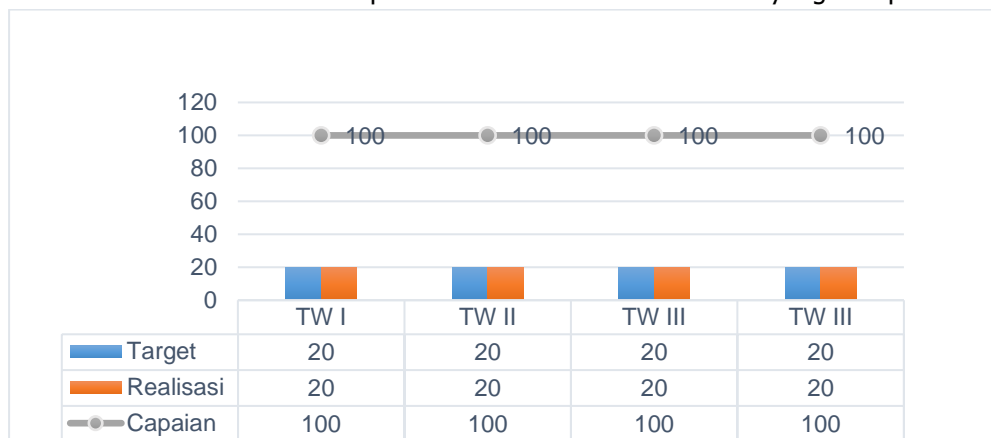
Untuk menghitung Indikator Kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun } (n)$$

## a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 sebesar 20 Lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 20 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.5**. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.

Gambar III.5. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi



## a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

### • Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Maluku Utara terdata 17 (Tujuh Belas) Pelabuhan SDP, namun sampai dengan tahun 2023 terdapat 20 (dua puluh) Pelabuhan SDP yang beroperasi sesuai dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

NO	Pelabuhan Penyeberangan	Keterangan
1.	Bastiong	Beroperasi
2.	Sofifi	Beroperasi
3.	Rum	Beroperasi
4.	Sidangole	Beroperasi



5.	Dowora	Beroperasi
6.	Weda	Beroperasi
7.	Saketa	Beroperasi
8.	Tobelo	Beroperasi
9	Daruba	Beroperasi
10	Subaim	Beroperasi
11	Sanana	Beroperasi
12	Mangole	Beroperasi
11	Bobong	Beroperasi
12	Babang	Beroperasi
13	Obi	Beroperasi
14	Doro kao	Beroperasi
15	Patani	Beroperasi
16	Gebe	Tidak Beroperasi
17	Batang Dua	Beroperasi
18	Makian	Beroperasi
19	Kayoa	Beroperasi
20	Moti	Beroperasi
21	Makian	Beroperasi

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi memiliki target 20 Lokasi (dua puluh) sesuai dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Realisasi Kinerja**

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan





penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN. Untuk menghitung Indikator Kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$IKK1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun } (n)$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Sebagai prasarana sandar kapal angkut penyeberangan;
2. Sebagai tempat intra dan antar moda transportasi;
3. Sebagai tempat kegiatan pemerintahan.

- **Faktor Kendala**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Pelabuhan penyeberangan yang memiliki fasilitas yang tidak memadai;
2. Letak Pelabuhan Penyeberangan yang tidak strategis;
3. Kurang terjaminnya keamanan di Pelabuhan Penyeberangan.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan Yang Beroperasi Tahun 2023 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu tercapainya target Operasional Pelabuhan Penyeberangan. Capaian operasional untuk masing-masing Pelabuhan dapat dilihat pada tabel berikut:





Daftar Rekapitulasi Pelabuhan Penyeberangan Yang Beroperasi  
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Nama Pelabuhan	Pengelola	Keterangan
1	Pelabuhan Penyeberangan Bastiong	PT. ASDP	Beroperasi
2	Pelabuhan Penyeberangan Rum	PT. ASDP	Beroperasi
3	Pelabuhan Penyeberangan Sidangole	PT. ASDP	Beroperasi
4	Pelabuhan Penyeberangan Batang Dua	Pemkot Ternate	Beroperasi
5	Pelabuhan Penyeberangan Moti	Pemkot Ternate	Beroperasi
6	Pelabuhan Penyeberangan Dowora	Pemkot Tidore Kepulauan	Beroperasi
7	Pelabuhan Penyeberangan Sofifi	Pemkot Tidore Kepulauan	Beroperasi
8	Pelabuhan Penyeberangan Daruba	BPTD Kelas II Maluku UTara	Beroperasi
9	Pelabuhan Penyeberangan Weda	BPTD Kelas II Maluku UTara	Beroperasi
10	Pelabuhan Penyeberangan Tobelo	Pemkab Halmahera Utara	Beroperasi
11	Pelabuhan Penyeberangan Subaim	Pemkab Halmahera Timur	Beroperasi
12	Pelabuhan Penyeberangan Patani	Pemkab Halmahera Tengah	Beroperasi
13	Pelabuhan Penyeberangan Makian	Pemkab Halmahera Selatan	Beroperasi
14	Pelabuhan Penyeberangan Kayoa	Pemkab Halmahera Selatan	Beroperasi
15	Pelabuhan Penyeberangan Babang	Pemkab Halmahera Selatan	Beroperasi
16	Pelabuhan Penyeberangan Saketa	Pemkab Halmahera Selatan	Beroperasi
17	Pelabuhan Penyeberangan Obi	Pemkab Halmahera Selatan	Beroperasi
18	Pelabuhan Penyeberangan Sanana	Pemkab Kepulauan Sula	Beroperasi
19	Pelabuhan Penyeberangan Mangole	Pemkab Kepulauan Sula	Beroperasi
20	Pelabuhan Penyeberangan Bobong	Pemkab Pulau Taliabu	Beroperasi

Jumlah eksisting pelabuhan yang berada di wilayah maluku utara berjumlah 22 (dua puluh dua) pelabuhan penyeberangan diantaranya





terdapat 20 (dua puluh) pelabuhan yang beroperasi dan 2 (dua) pelabuhan penyeberangan yang tidak beroperasi. Dari 20 (dua puluh) pelabuhan penyeberangan hanya terdapat 2 (dua) pelabuhan yang berada di bawah unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara yaitu :

1. Pelabuhan Penyeberangan Daruba, Morotai;
2. Pelabuhan Penyeberangan Weda, Halmahera Tengah.

Realisasi indikator kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 20 (dua puluh) Lokasi dengan target indikator kinerja sebesar 20 lokasi.

Dari data realisasi indikator kinerja diatas maka dapat di hitung capaian indikator kegiatan, sebagai berikut:

IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan beroperasi s.d Tahun(n)

$$IKK 1.6 = 20 \text{ Lokasi}$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

#### • **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 4638 - Pelayanan Transportasi Darat dengan nomenklatur 051 - Operasional Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan terkait Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan pagu anggaran senilai Rp. 3.176.260.000 dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp 3.176.258.581 sehingga capaian sebesar 100%

#### **a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penambahan SDM di Pelabuhan SDP





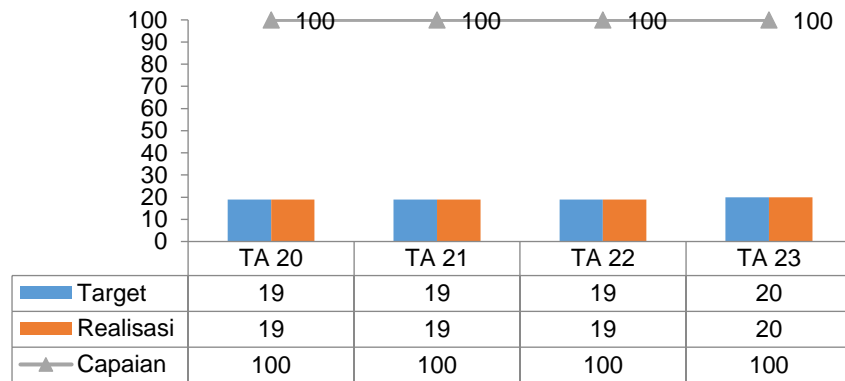
2. Untuk Meningkatkan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi akan diupayakan Pelabuhan Penyeberangan Doro Kao Kabupaten Halmahera Utara untuk Beroperasi;
3. Untuk Meningkatkan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi akan diupayakan usulan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dikoordinasikan ke BPTD Kelas II Maluku Utara untuk diteruskan Ke Ditjen

#### **a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022**

Realisasi indikator kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 berjumlah 20 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 berjumlah 20 lokasi, maka capaian indikator kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 mencapai 100%. sedangkan pada tahun tahun 2020 ,2021 dan 2022 capaian indikator kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi berjumlah 19 lokasi dengan target kinerja 19 lokasi. Jadi realisasi pada tahun 2023 sama besar dengan realisasi pada tahun 2020,2021 dan 2022 yaitu 100%. untuk rincian capaian pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

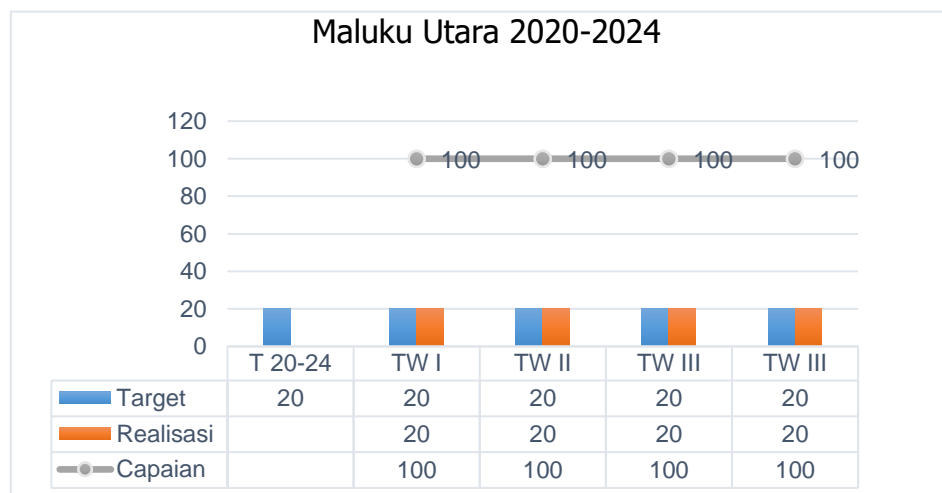
No.	IKK	T 2020			T 2021			T 2022			T 2023			Naik/ Turun
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi														
1	IKK 1.1	19 Lks	19 Lks	100%	19 Lks	19 Lks	100%	19 Lks	19 Lks	100%	20 Lks	20 Lks	100%	konstan



**a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.**

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2023 sebesar 20 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 20 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.6** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024.

Gambar III.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II





## **Sasaran Strategis 2: Meningkatkan pelayanan transportasi darat**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

### **IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP**

#### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

Untuk menghitung persentase Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dapat menggunakan rumus berikut:

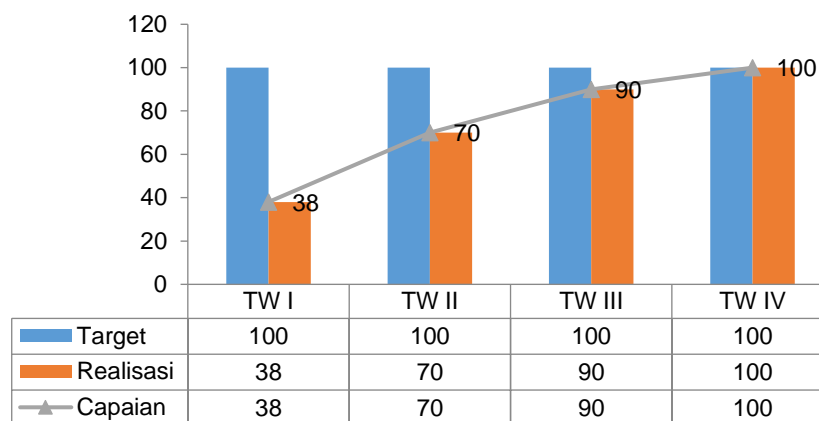
$$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$



## a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.7**. Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2023.

Gambar III.7. Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2023



## a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

### • Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan, maka ditetapkan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan dibawah Lingkungan BPTD Kelas II Maluku Utara.

### • Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap pelayanan



transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada angkutan penyeberangan di pelabuhan SDP merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan	Uraian
1. SPM Pelayanan Penumpang 2. SPM Pemuatan Kendaraan 3. SPM Pengoperasian Kapal	Aspek Keselamatan
	Aspek Keamanan
	Aspek Kenyamanan
	Aspek Kemudahan / Keterjangkauan
	Aspek Kesetaraan
	Aspek Keteraturan

- Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dapat menggunakan rumus berikut:

$$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:





$$\text{Pelaksanaan SPM} = \frac{20}{20} = 100$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP antara lain:

1. Dari 20 Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi telah dilaksanakan SPM pada 20 Pelabuhan Penyeberangan;
2. Beberapa Pelabuhan Penyeberangan sudah dilakukan rehabilitasi;
3. Terpenuhinya beberapa fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan.

- **Faktor Kendala**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP antara lain:

1. Minimnya pelayanan fasilitas yang memadai di pelabuhan penyeberangan sehingga memberikan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa;
2. Tidak ada perubahan mengenai hasil setelah dilakukannya Standar Pelayanan Minimum (SPM);
3. Ketidaknyamanan pengguna jasa di Pelabuhan SDP.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Dari data realisasi indikator kinerja diatas maka dapat di hitung capaian indikator kegiatan, sebagai berikut:

Untuk menghitung persentase Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dapat menggunakan rumus berikut:

$$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$





$$\text{Pelaksanaan SPM} = \frac{20}{20} = 100$$

Sehingga capaian indikator kinerja triwulan I adalah :

$$\% \text{ Pelaksanaan SPM} = \frac{100}{100} * 100 = 100\%$$

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja Kegiatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dan pemerintah daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dengan adanya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal keberangkatan di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;
4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dalam mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 4640 – Pemantauan dan Evaluasi dengan nomenklatur 923- pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM kapal dan Pelabuhan Penyeberangan pagu anggaran senilai Rp. 34.213.000 dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp 34.213.000 maka capaian sebesar 100%.





#### a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Untuk Meningkatkan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP akan dilaksanakan SPM di Pelabuhan Daruba Kabupaten Pulau Morotai;
2. Untuk Meningkatkan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP akan dilaksanakan SPM di Pelabuhan Gorua Kabupaten Halmahare Utara;
3. Untuk Meningkatkan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP akan dilaksanakan SPM di Pelabuhan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

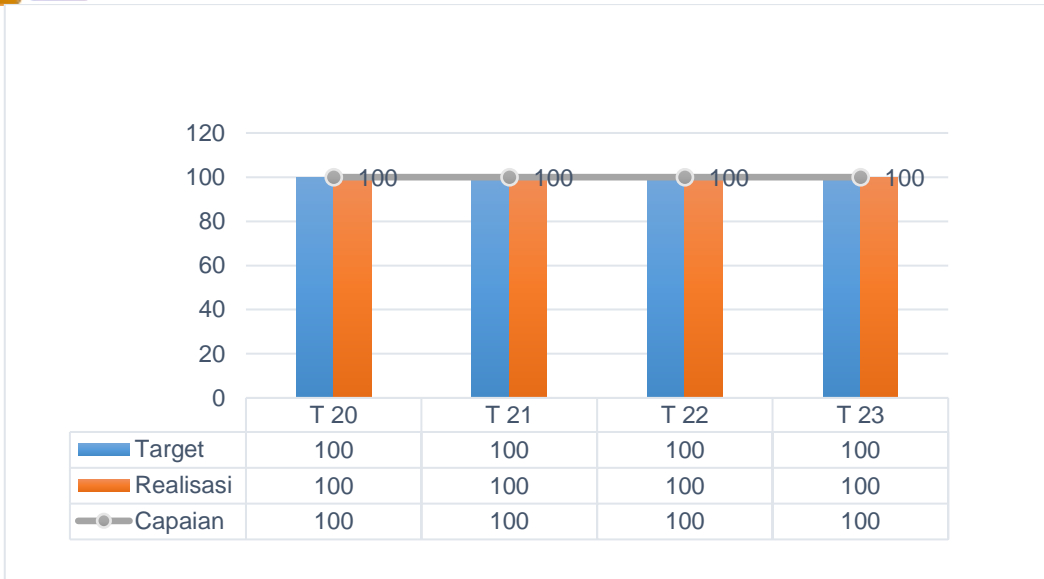
#### a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 , 2021, 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 s.d 2022 capaian kinerja sebesar 100% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 s.d. 2022 sama dengan tahun 2023 yaitu dari 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021,2022 dan Tahun 2023

No.	IKK	T 2020			T 2021			T 2022			T 2023			Naik/ Turun
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat														
1	IKK 2.1	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	konstan

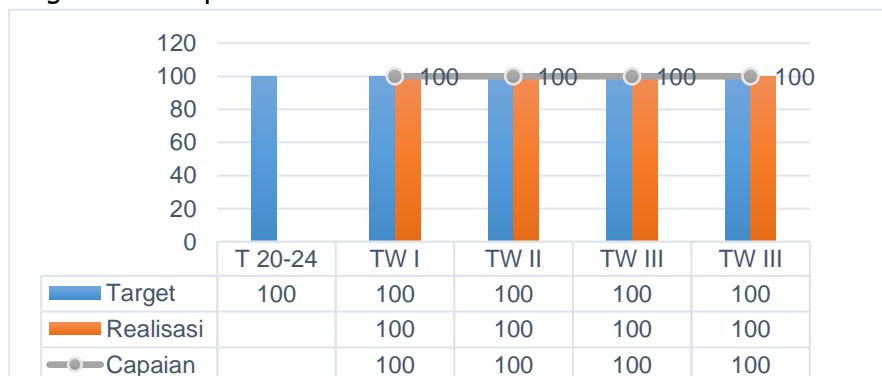




**a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Realisasi Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.8**. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Gambar III.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024





### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pelayanan transportasi darat**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
2. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan
3. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
4. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP

#### **IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal**

##### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015.

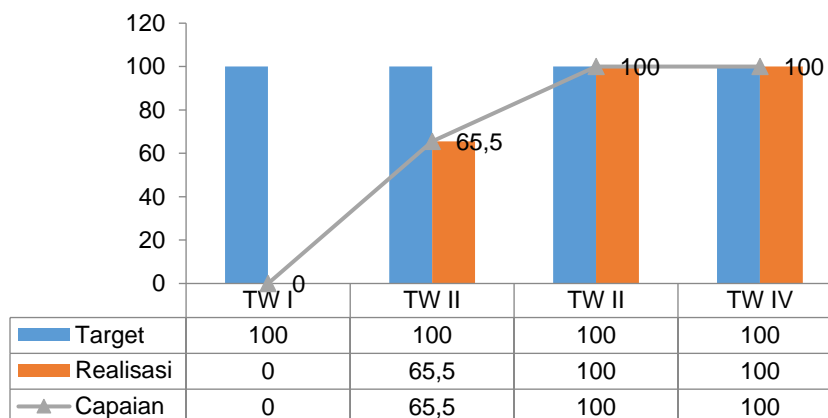
$$IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$



### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2023

Realisasi Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.9**. Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.

Gambar III.2. Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal



### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan, maka ditetapkan untuk pelaksanaan Perlengkapan Jalan BPTD Kelas II Maluku Utara telah sesuai berdasarkan dasar hukum.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap



Keselamatan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$IKK 4.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun keberhasilan dalam kegiatan ini sebagai berikut .

1. Perlengkapan Jalan terpasang sesuai dengan jumlah yang dianggarkan;
2. Perlengkapan jalan berfungsi dengan sebagaimana mestinya;
3. Perlengkapan jalan kebermanfaatannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

- **Faktor Kendala**

Adapun kendala dalam kegiatan ini sebagai berikut.

1. Keterlambatan pemasangan perlengkapan jalan;
2. Terdapat beberapa perlengkapan jalan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
3. Faktor cuaca yang mempengaruhi ketika dilaksanakannya pemasangan.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator kinerja persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan III sebesar 100% dengan target setahun sebesar 100%.

Data Realisasi Kegiatan sebagai berikut.





1. Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalulintas (Uk. 75X75 Cm) dengan total volume pemasangan 153 Unit.
  2. Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Putih 1M' pada lima ruas jalan
  3. Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Kuning Uk. (3 X 120 Mm) 1M' pada lima ruas jalan
  4. Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Lpju Solar Cell H = 9 M Single Arm dengan total volume pemasangan sebesar 70 unit
  5. Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Type 2 : Terminal End Lengkung) dengan volume pemasangan sebanyak 77 unit pada empat ruas jalan
  6. Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan RPPJ UK (120x180 cm) dengan volume 4 unit pada empat ruas jalan
  7. Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Lpju Solar Cell H = 9 M Single Arm dengan volume 39 unit
- b. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan.
1. Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalulintas (Uk. 75X75 Cm) volume 24 buah
  2. Pengadaan Dan Pemasangan Lpju Solar Cell H = 9 M Single Arm sebanyak 22 unit
- c. Penanganan Lokasi Rawan Keselamatan (LRK)
1. Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalulintas (Uk. 75X75 Cm) sebanyak 15 buah
  2. Pengadaan Dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Type 2 : Terminal End Lengkung) sebanyak 17 unit
  3. Pengadaan Dan Pemasangan Lpju Solar Cell H = 9 M Single Arm sebanyak 18 unit

Sehingga capaian kinerja adalah

*Realisasi Jumlah pemasangan perlengkapan jalan*

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target Jumlah pemasangan perlengkapan jalan}}{\text{Target Jumlah pemasangan perlengkapan jalan}}$$





$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{24.391}{24.391} = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 4639 – Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat dengan nomenklatur 052 – perlengkapan jalan terkait pengadaan perlengkapan jalan dengan pagu anggaran senilai Rp. 24.700.303.000 dengan realisasi anggaran Tahun 2023 senilai Rp. 24.700.303.000 atau Capaian sebesar 100%.

- a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

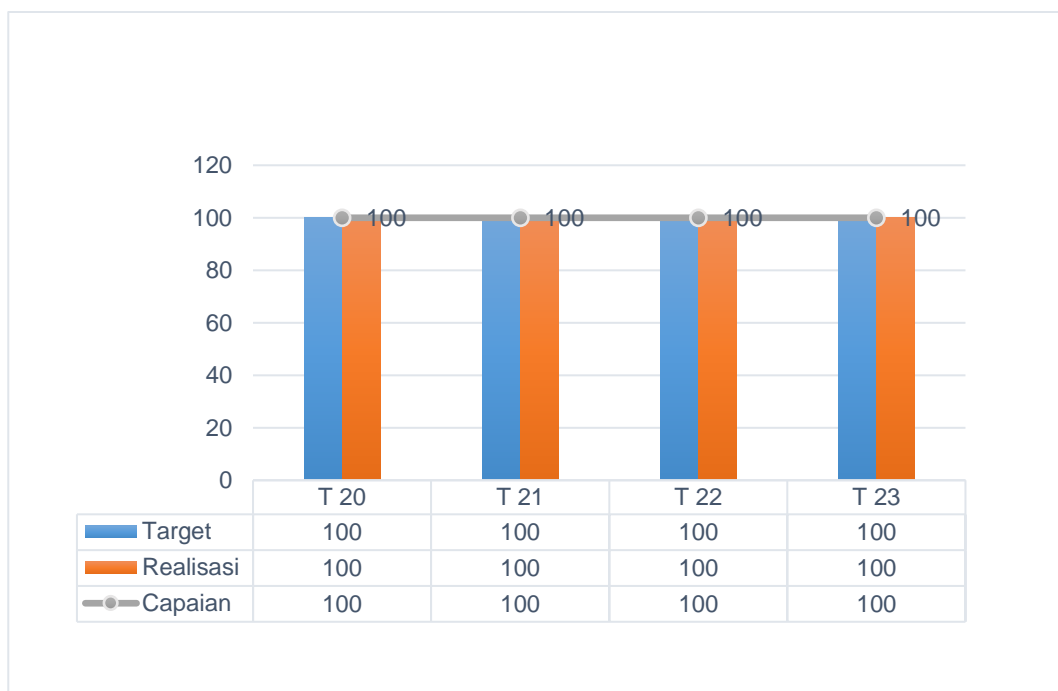
1. Membuat time schedule;
2. Melaksanakan pengawasan pada spesifikasi teknis;
3. Melakukan evaluasi kebermanfaatan perlengkapan jalan.

- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 , 2021, 2022 dan Tahun 2023**

Realisasi kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 s.d. 2022 capaian kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 100% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi sama dengan tahun 2023 yaitu 100, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No	IKK	T 2020			T 2021			T 2022			T 2023			Naik/ Turun
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat														
1	IKK 3.1	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	konstan

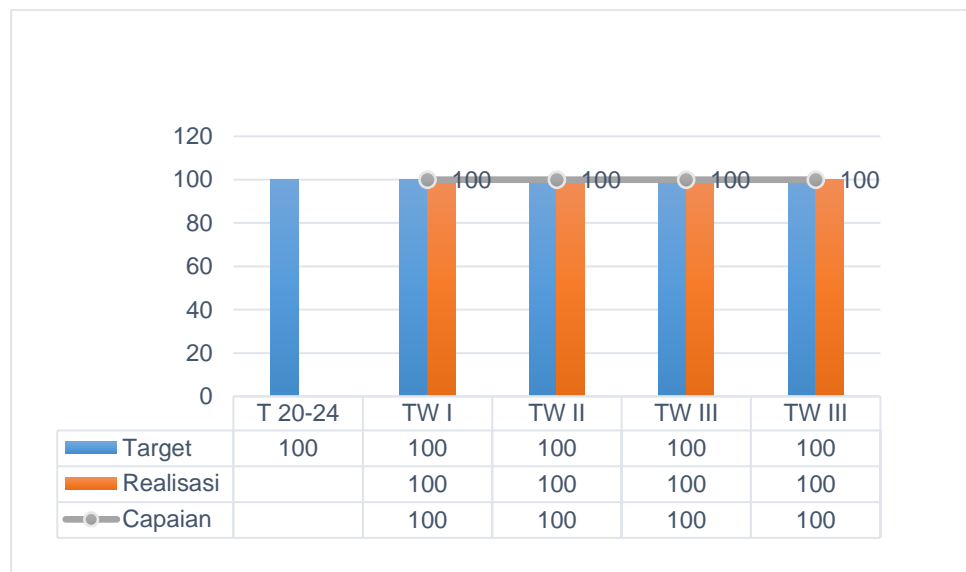


**a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.**

Realisasi kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.9**. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2023 Terhadap

Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Gambar III.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.



### IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

#### a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap

Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

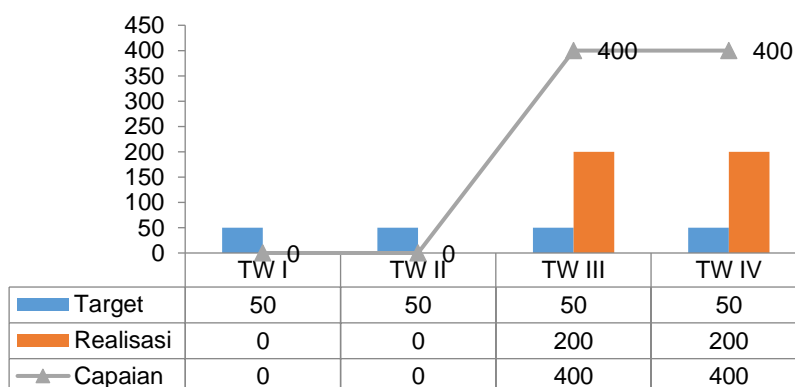
Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

*IKK3.1 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ*

### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023 sebesar 200 orang jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 50 orang maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10**. Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.

Gambar III.10. Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023



### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b "Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta



program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Kecepatan terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 50 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

- **Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

*IKK3.1 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ*

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Memberikan pengetahuan tentang berlalu lintas yang berkeselamatan kepada murid – murid SMA;
2. Menumbuhkembangkan etika berlalu lintas di jalan;
3. Membantu mengurangi kejadian kecelakaan pada anak usia remaja;
4. Memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan etika berlalu lintas di jalan kepada masyarakat provinsi Maluku Utara.





- **Faktor Kendala**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Sosialisasi belum dilaksanakan pada daerah yang memiliki akses yang sulit untuk dijangkau;
2. Narasumber yang terbatas;
3. Peralatan sosialisasi yang membutuhkan pembaharuan.

- **Capaian Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan adalah

$$IKK3.5 = 200 \text{ orang}$$

Sehingga capaian kinerja ini sebesar .

$$200 \text{ orang} / 50 \text{ orang} * 100 = 400\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 4639 – Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Darat dengan nomenklatur 051- Pekan Nasional Keselamatan Jalan pagu anggaran senilai Rp. 300.000.000 dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp 300.000.000 maka capaian sebesar 100%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengusulkan anggaran pada tahun berikutnya;
2. Menambah jumlah masyarakat yang tersosialisasi;
3. Melakukan pengadaan peralatan sosialisasi;
4. Melakukan bimtek kepada tim sosialisasi keselamatan.

**a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023**

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023 sebesar 50 orang jika

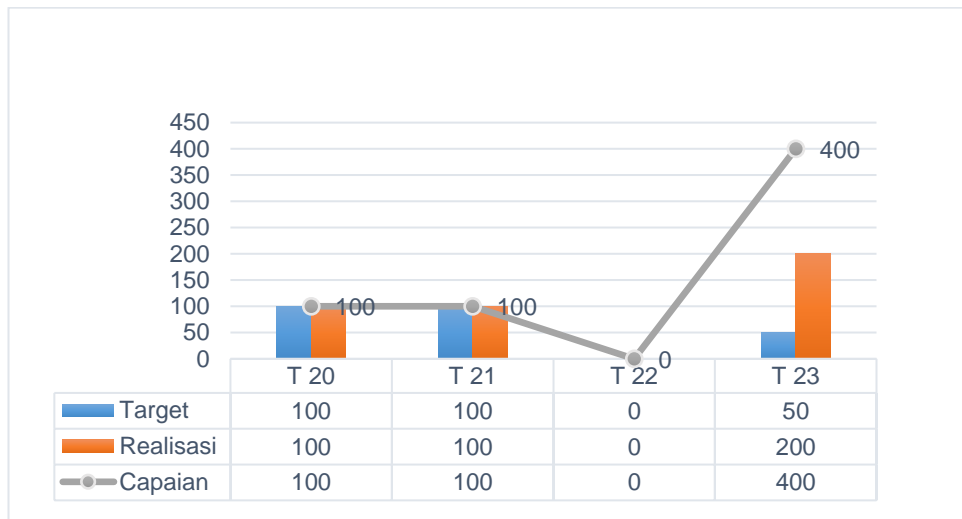




dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 50 orang maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020, 2021 capaian kinerja sebesar 100 dengan target 100 maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 0 orang dengan target 0 orang maka capaian kinerja mencapai 0% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.6. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No	IKK	T 2020			T 2021			T 2022			T 2023			Naik/ Turun
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat														
1	IKK 3.5	100 org	100 org	100%	100 org	100 org	100%	0	0	0	50	200	150	turun



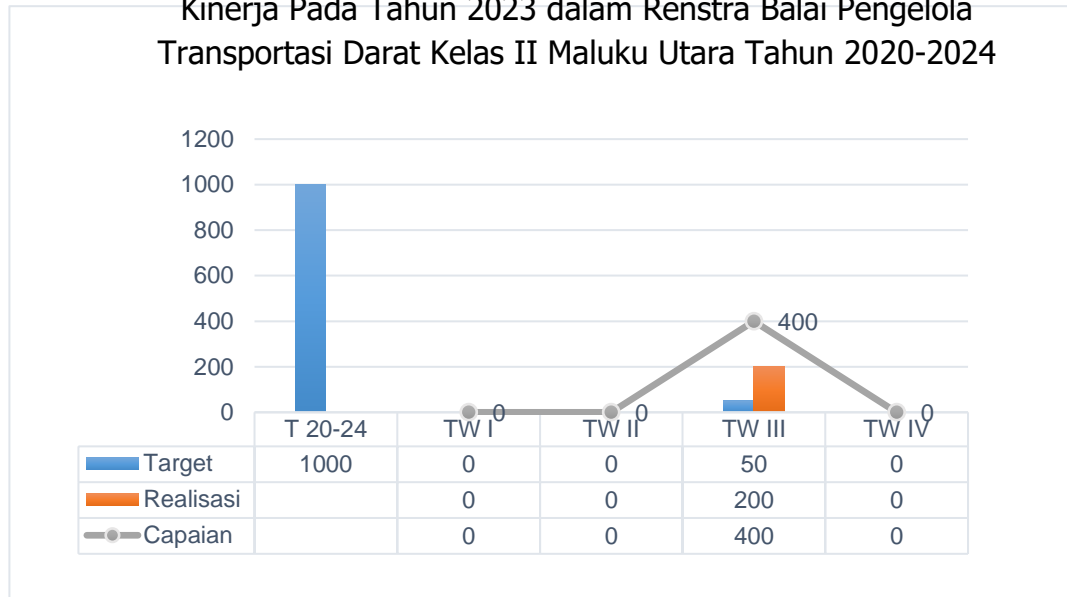
#### a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024

Realisasi Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi



Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%.

Gambar III.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Persentase Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024



## IKK 7a Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor

### a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Untuk menghitung persentase kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dapat menggunakan rumus berikut:



$$\begin{array}{l} \% \text{ Persentase} \\ \text{standarisasi pengujian} \\ \text{berkala kendaraan} \\ \text{bermotor} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah UPUBKB Pemda yang lulus} \\ \text{akreditasi s.d tahun (n)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Pemda} \end{array}} \times 100\%$$

### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.12**. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023.

Gambar III.12. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023



### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1471/aj.402/drjd/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji





Berkala Kendaraan Bermotor. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

- **Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung persentase kinerja kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dapat menggunakan rumus berikut:

$$\begin{array}{l} \% \text{ Persentase} \\ \text{standarisasi pengujian} \\ \text{berkala kendaraan} \\ \text{bermotor} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah UPUBKB Pemda yang lulus} \\ \text{akreditasi s.d tahun (n)} \end{array}}{\text{Jumlah Pemda}} \times 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Peningkatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan umum di daerah melalui Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor;





2. Adanya bantuan Sarana Pengujian kendaraan Bermotor berupa mobil Uji Keliling dari Kementerian melalui BPTD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku Utara;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan melalui pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
4. Kegiatan sudah dilaksanakan pada bulan Maret.

- **Faktor Kendala**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Tidak adanya pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan umum di daerah melalui Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB);
2. Terbatasnya anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengadaan alat uji baru.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor berdasarkan kualifikasi penguji;

- **Capaian Kinerja**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan transportasi jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Adapun tindak lanjut yang dilakukan di Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP pada seluruh Kab/Kota;
2. Capaian Indikator Kinerja pada triwulan III tahun 2023 sebesar 100% sesuai dengan target Revisi I Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100% .  
% Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.





$$\frac{2}{2} \times 100 = 100$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 923 – pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait persentase kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pagu anggaran senilai Rp 75.000.000 dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp 75.000.000 sehingga capaian sebesar 100%

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terciptanya deteksi pencapaian kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alat ukur/uji dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
2. Menjamin peralatan alat ukur/uji yang digunakan harus sesuai spesifikasi yang di persyaratkan.
3. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai standar dan SOP yang telah ditentukan.
4. Terus meningkatkan kualitas SDM terkait pengujian kendaraan bermotor melalui Bimtek dan pelatihan – pelatihan.
5. Membantu Dishub Kab/ Kota untuk memenuhi Peralatan uji kendaraan bermotor

**a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023**

Realisasi kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 50% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 dan 2021 capaian kinerja sebesar 0 kab/kota (masih mengikuti

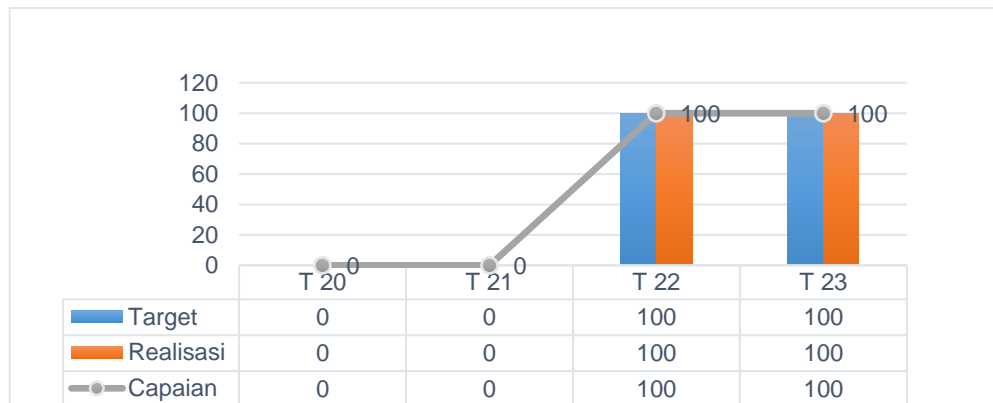




satuan nomenklatur lama IKK) dengan target 0 kab/kota (masih mengikuti satuan nomenklatur lama IKK) maka capaian kinerja mencapai 0% dan pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 100% dengan target 100% maka capaian kinerja 100% serta pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100% dengan target 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020,2021 dan 2022 menunjukkan kenaikan pada tahun 2023 yaitu 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.7. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	IKK	T 2020			T 2021			T 2022			T 2023			Naik/ Turun
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat														
1	IKK 7a	0	0	0	0	0	0	100	100	100%	100	100	100%	Naik



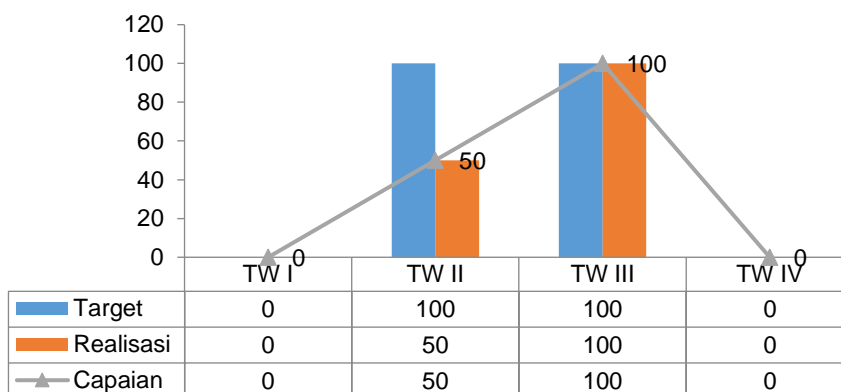
**a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Realisasi Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 100% maka capaian



kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.13.**

Gambar III.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024



## IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

### a.1. Definisi Indikator Kinerja

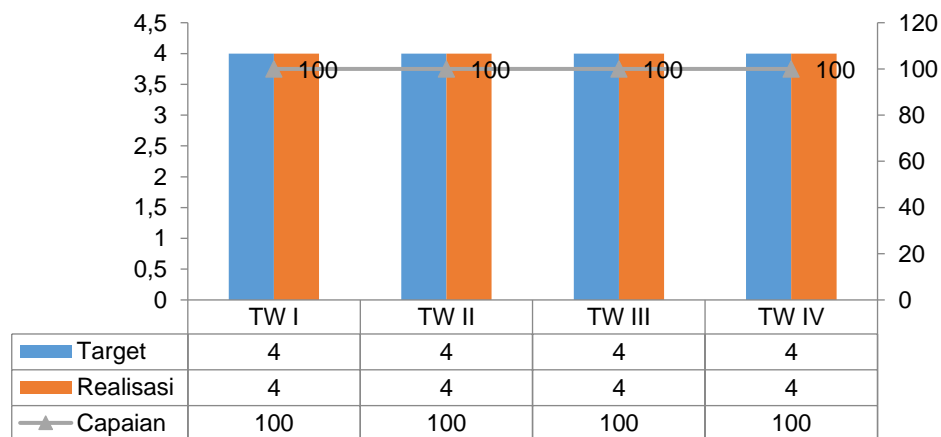
Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK7b = \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun } (n)$$

## a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tahun 2023 sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 4 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.14**. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023.

Gambar III.14. Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023



## a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 25 tahun 2011 tentang sarana bantu navigasi pelayaran, Hampir seluruh Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Maluku Utara telah memiliki fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sehingga terjaminnya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran sungai dan danau. Pada tahun 2023 tidak terdapat pembangunan fasilitas SBNP dikarenakan tidak tersedia anggaran.



Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK7b = \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun } (n)$$

$$IKK7b = 4 \text{ Unit}$$

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 4 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$IKK7b = \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun } (n)$$

$$IKK7b = 4 \text{ Unit}$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP antara lain:

1. Terpasangnya fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP;
2. Fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP berfungsi dengan sebagaimana mestinya;
3. Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP kebermanfaatannya bisa langsung dirasakan oleh kapal penyeberangan.





- **Faktor Kendala**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP antara lain:

1. Tidak terpasangnya fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP;
2. Terdapat beberapa fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
3. Pemeliharaan fasilitas yang tidak berjalan dengan baik.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tahun 2023 adalah 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tahun 2023 memenuhi target yang ditentukan.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2023 termuat dalam anggaran kegiatan monitoring rutin BPTD Kelas II Maluku Utara.

#### **a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Upaya untuk meningkatkan kinerja , Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan SDP;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan SDP serta memberikan kemudahan bagi pengguna SDP dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan perairan yang berkeselamatan
4. Menginventarisasi kembali jumlah rambu sungai yang akan dipasang
5. Memasang rambu sungai di daerah yang belum terpasang

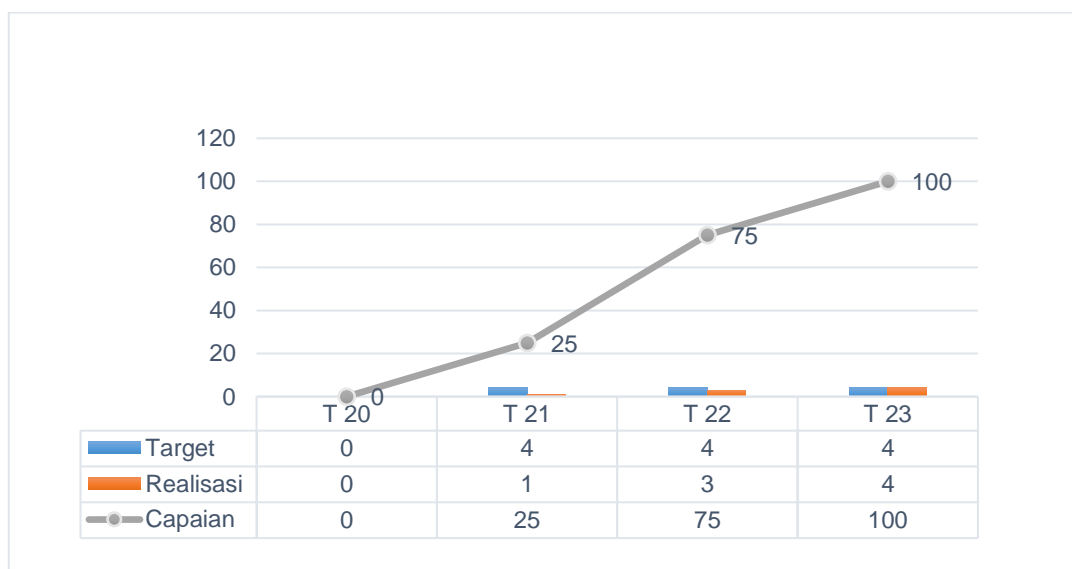


### a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku 2020-2024 sebesar 4 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020, 2021 s.d. 2022 capaian kinerja sebesar 1 Lokasi dengan target 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 s.d. 2022 mengalami peningkatan dengan tahun 2023 yaitu 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.8. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	IKK	T 2020			T 2021			T 2022			T 2023			Naik/ Turun
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat														
1	IKK 7b	0	0	0	1	4	25%	3 Unit	4 Unit	90%	4	4	100%	Naik

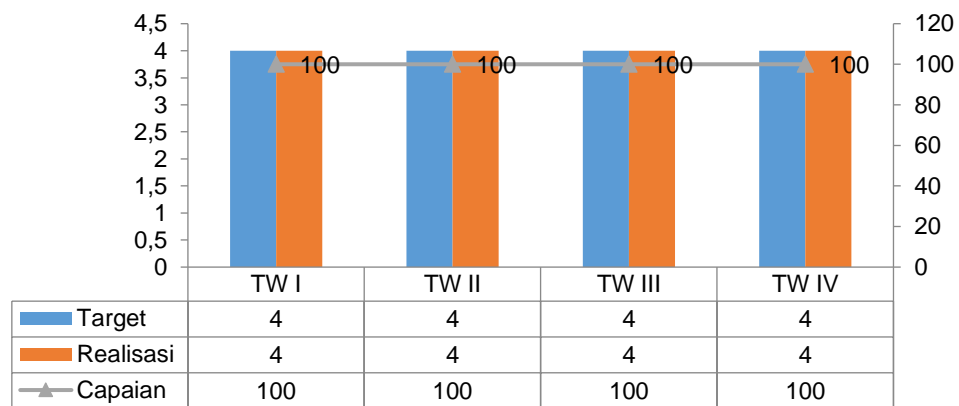




**a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Realisasi Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2023 sebesar 4 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 4 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.15**.

Gambar III.15. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024





## ***Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat***

Pencapaian Sasaran Program 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

### **IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat**

#### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

##### a. Aspek Perencanaan

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

##### b. Aspek Kepegawaian (SDM);

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

##### c. Aspek Keuangan;

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan,

##### d. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)

aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:



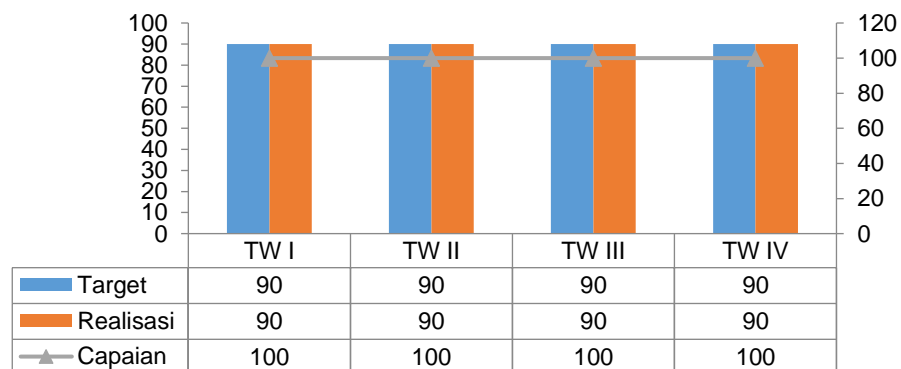


No	Uraian	Bobot	Nilai
<b>A</b>	<b>Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan</b>	<b>25%</b>	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
2	Perjanjian Kinerja	5%	
3	pengisian input e-planning	5%	
4	pengisian input e-performance	5%	
<b>B</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>25%</b>	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
2	Kompetensi	10%	
3	Kinerja	8%	
4	Disiplin	1%	
<b>C</b>	<b>Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja</b>	<b>25%</b>	
<b>D</b>	<b>Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran</b>	<b>25%</b>	

### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2023

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2023 sebesar senilai 90. Jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar senilai 90 maka capaian kinerja mencapai 100% Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 16**. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

Gambar III 16 Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023





### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mempunyai 4 (empat) unit kerja Eselon IV, sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Prasarana Jalan Sungai DP;
3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP
4. Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023, Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis transportasi darat memiliki target senilai 90 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu dengan nilai sebesar 90 dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	25%
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%
	2	Perjanjian Kinerja	5%
	3	pengisian input e-planning	5%



	4	<i>pengisian input e-performance</i>	5%	5%
<b>B</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>		<b>25%</b>	<b>25%</b>
	1	<i>Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)</i>	6%	6%
	2	<i>Kompetensi</i>	10%	10%
	3	<i>Kinerja</i>	8%	8%
	4	<i>Disiplin</i>	1%	1%
<b>C</b>	<b>Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja</b>		<b>25%</b>	<b>25%</b>
<b>D</b>	<b>Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran</b>		<b>25%</b>	<b>25%</b>

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} &\text{Kualitas penyelenggaraan} \\ &\text{dukungan teknis transportasi} \\ &\text{darat} \end{aligned} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90}{90} \times 100\% = 100\%$$

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2023 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Penyusunan bahan RKA
2. Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD
3. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat;
4. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
5. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
6. Kalibrasi alat uji;





7. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun;
8. Sosialisasi Andalalin di Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Pengawasan Gakum;
10. Pengiriman Pegawai Diklat
11. Penyidikan dan pendampingan pasal 277 UU Tahun 2009
12. Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan Bidang LLAJ

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) berjenjang disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan;
2. Penginputan data capaian kinerja pada aplikasi e-performance disampaikan tepat waktu setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berjalan;
3. Data Dukung dalam penyusunan dokumen SAKIP dikumpulkan oleh tim tepat waktu.

Aspek kepegawaian.

1. Terdapat kualifikasi pendidikan pegawai dengan tingkat S2, S1 dan D3;
2. Pegawai memiliki kinerja yang baik;
3. Pegawai dengan tingkat disiplin yang baik;

Aspek keuangan.

1. Mampu mencapai realisasi sesuai dengan rencana penarikan dana per bulan;
2. Mampu mencapai tingkat penyerapan daya serap yang telah di targetkan;
3. Semua rencana pencairan pekerjaan fisik maupun non fisik berjalan sesuai dengan perencanaan.





Aspek Penyelenggaraan Perkantoran.

1. Hasil survey menunjukkan tingkat penyelenggaraan perkantoran telah baik
2. Kenyamanan dalam bekerja telah memadai
3. Pegawai mampu bekerja tim

- **Faktor Kendala**

Adapun kegagalan kegiatan sebagai berikut:

Aspek perencanaan.

1. Data dukung capaian kinerja dari TIM SAKIP setiap seksi sering mengalami keterlambatan;
2. Jaringan internet kadang menjadi kendala pada saat Penginputan data capaian kinerja pada aplikasi e-performance dan E-sakip Reviu;
3. Capaian indikator kinerja kegiatan belum mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan pada bulan berjalan.

Aspek kepegawaian.

1. Tidak terdapat pengembangan peningkatan SDM pegawai dikarenakan kekurangan anggaran;
2. Kinerja pegawai yang menurun;
3. Tidak berjalannya kontrol disiplin pegawai oleh TIM Unit kepatuhan Internal.

Aspek keuangan

1. realisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana per bulan dikarenakan rencana kerja tidak berjalan sesuai;
2. pencairan dana termin kegiatan fisik tidak sesuai dengan jadwal pencairan karena mengalami adendum;
3. Surat perintah membayar di tolak oleh KPPN dikarenakan data dukung pengajuan tidak lengkap.



Aspek penyelenggaraan perkantoran.

1. Hasil survey menunjukkan tingkat penyelenggaraan perkantoran masih kurang
2. Kurangnya kenyamanan dalam bekerja telah memadai
3. Pegawai tidak mampu bekerja tim

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target sebesar 90. maka perhitungan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{90}{90} \times 100 = 100\%$$

a. Aspek perencanaan

Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan pada BPTD Kelas II Maluku Utara Tahun 2022 :

No	Uraian	Bobot	Nilai
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	100
2.	Perjanjian Kinerja	5%	100
3.	pengisian input e-planning	5%	100
4.	pengisian input e-performance	5%	100

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Aspek perencanaan Tahun 2023 terhadap Aspek Perencanaan Tahun 2023 yaitu sebesar:



$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

b. Aspek kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil. indeks profesionalisme ASN pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dinilai dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Sehingga Indeks Profesionalisme ASN:

No	Uraian	Bobot	Nilai
1.	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	100
2.	Kompetensi	10%	100
3.	Kinerja	8%	100
4.	Disiplin	1%	100

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Aspek kepegawaian Tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

c. Aspek Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara melaporkan Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan realisasi





pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap triwulan selama suatu periode.

Tingkat penyerapan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Maluku Utara dinilai membandingkan anggaran dengan realisasi anggaran .

No	Uraian	Bobot	%
1.	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Tahun	25%	99,98%

d. Aspek penyelenggaraan perkantoran

aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara terhadap penyelenggaraan perkantoran.

No	Uraian	Bobot	Nilai
1.	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	100

• **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 4640 - Penunjang Teknis Transportasi Darat dengan nomenklatur 923 – Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pagu anggaran senilai Rp. 3.906.861.000 terkait Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 dengan Realisasi anggaran hingga Triwulan III senilai Rp 3.906.853.613 maka capaian sebesar 100%

**a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menginput capaian kinerja kegiatan pada aplikasi e-peformance tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan;





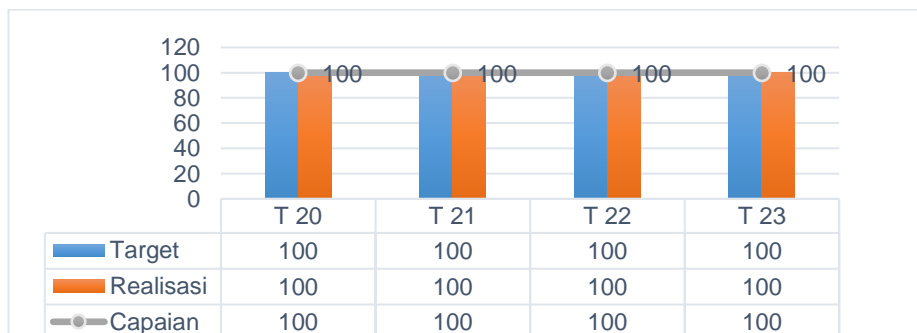
2. Menyusun Dokumen SAKIP sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai dan memberikan apresiasi kepada pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara yang berprestasi agar meningkatkan motivasi bagi pegawai dalam melaksanakan tugas.
4. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran sesuai dengan anggaran yang tersedia agar realisasi anggaran untuk penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target.

#### a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2023 senilai 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 senilai 90, maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020,2021 dan tahun 2022 capaian kinerja senilai 85 dengan target 85 maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2021 s.d. 2023 yaitu 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023

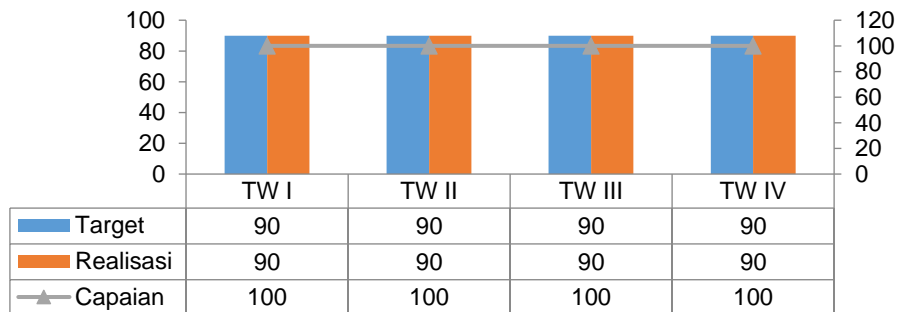
No	IKK	T 2020			T 2021			T 2022			T 2023			Naik/ Turun	
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C		
SK 5 Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat															
1	IKK 5.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Konstran



### a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2023 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.17**. Perbandingan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara

Gambar III.17. Perbandingan Realisasi Kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024





## **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel**

Pencapaian Sasaran Program 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

### **IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat**

#### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
  - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
  - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
  - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
<b>A</b>	<b>Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV</b>	<b>25%</b>	
	1 Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	<b>15</b>	
	2 Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	<b>10</b>	
<b>B</b>	<b>Tingkat Kepuasan Staf</b>	<b>25%</b>	



C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

### Cara Perhitungan:

1. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
2. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;
3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:
4. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

5. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

6. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

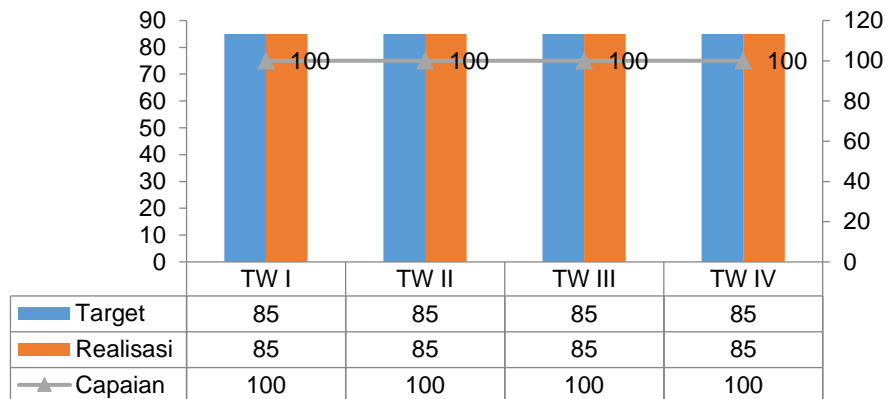
$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2023

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 senilai 85. Jika dibandingkan dengan target PK 2023 senilai 85 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.18**. Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

Gambar III.18. Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.  
Tahun 2023





### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2023., Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel memiliki target senilai 85 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.





### • Realisasi Kinerja

- ✓ Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
- ✓ Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
- ✓ Bobot:
  - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
  - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
  - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
<b>A</b>	<b>Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV</b>		<b>25%</b>	
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	<b>15</b>	
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	<b>10</b>	
<b>B</b>	<b>Tingkat Kepuasan Staf</b>		<b>25%</b>	
<b>C</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran</b>		<b>50%</b>	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

### Cara Perhitungan:

- a. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
- b. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;
- c. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:
- d. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

- e. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop





$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

f. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara pada tahun 2023 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas Maluku Utara.

• **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Terwujudnya kenyamanan sarana dan prasarana dalam bekerja dengan melengkapi perlengkapan dan peralatan yang memadai;
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan unit kerja memperoleh informasi;
3. Terwujudnya pelayanan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai.

• **Faktor Kendala**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya fasilitas internet yang tidak memadai menurunkan penggunaan teknologi informasi oleh unit kerja;
2. Tidak terwujudnya kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan perkantoran disebabkan tidak memadainya fasilitas sarana dan prasarana;
3. Pelayanan administrasi kepegawaian yang kurang memadai

• **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator kinerja kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dilakukan dengan





melaksanakan survei kepuasan pada pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dengan hasil sebagai berikut.

- Ketanggapan pegawai terhadap kesulitan unit kerja dalam menyusun perencanaan program dan anggaran dengan nilai 100%;
- Kemudahan dalam mengakses hasil dari penyusunan perencanaan program dan anggaran dengan nilai 100%;
- Kemudahan dalam memperoleh informasi tentang peraturan dengan nilai 95%;
- Keramahan pegawai dalam melaksanakan pelayanan dengan nilai 100%.

#### Daftar Jumlah Fasilitas

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Fasilitas Meja	60 Unit
2	Fasilitas Kursi	116 Unit
4	Fasilitas PC	18 Unit
5	Fasilitas Laptop	37 Unit

Untuk menghitung Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat triwulan II digunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$





### Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Sehingga capaian Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat adalah

#### 1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja

$$x = \frac{60}{97} x = 0,61$$

$$\text{Sehingga Capaian} = \frac{0,61}{100} \times 100 = 61\%$$

#### 2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kursi

$$x = \frac{116}{97} x = 1,19$$

$$\text{Sehingga Capaian} = \frac{119}{100} \times 100 = 119\%$$

#### 3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC

$$y = \frac{18}{97} = 0,18$$

$$y = \frac{0,18}{100} \times 100\% = 18\%$$

#### 4. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Laptop

$$y = \frac{37}{97} = 0,38$$





$$y = \frac{0,38}{100} \times 100\% = 38\%$$

#### 5. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{4,35 \text{ Mbps}^{**}}{11 \text{ Mbps}^{****}}$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 4670 - Pengelolaan Organisasi dan SDM Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terkait indikator kinerja penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan pagu anggaran senilai Rp. 20.398.982.000 Realisasi anggaran Tahun 2023 Rp. 20.395.125.688 maka capaian sebesar 99,99%

#### **a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan perawatan dan pemeliharaan fasilitas meja dan kursi
2. Menambah fasilitas meja dan kursi sesuai jumlah pegawai
3. Meningkatkan fasilitas internet kantor untuk meningkatkan kinerja pegawai.
4. Mengoptimalkan sistem pengendalian dan belum terdapat evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan BPTD ;

#### **a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023**

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan tahun 2023 senilai 85 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020-2024 senilai 85, maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020,2021 dan 2022 capaian kinerja senilai 85,5 dengan target senilai 85,5 serta pada tahun 2022 capaian kinerja senilai 85,5 dengan target 85,5





maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2021 s.d. 2023 yaitu 100%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

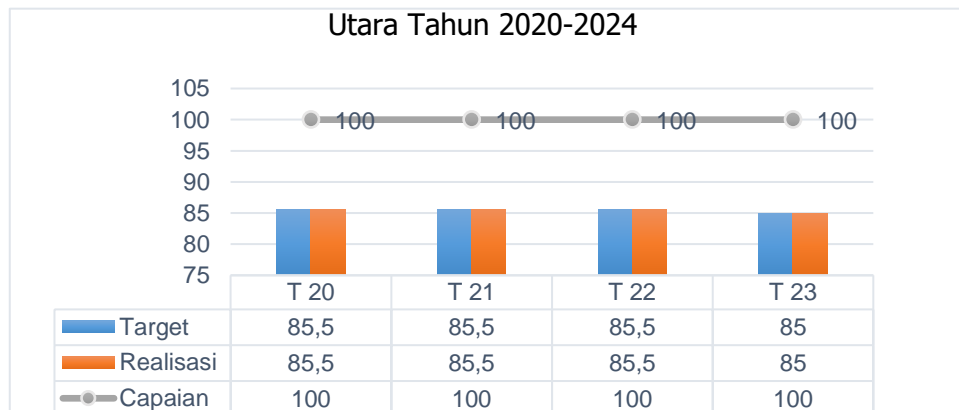
Tabel III.10. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	IKK	T 2020			T 2021			T 2022			T 2023			Naik/ Turun
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
SK 1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel														
1	IKK 1	85.5	85.5	100	85.5	85.5	100	85.5	85.5	100%	85	85	100%	Konstan

#### a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024

Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 senilai 85 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2020 - 2024 senilai 85 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.19**. Perbandingan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Gambar III.19. Perbandingan realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2020-2024





**III. 3. REALISASI ANGGARAN**  
**III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023**  
**III.3.1.1. Pagu Anggaran**

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2023 sebesar **Rp. 79.661.390.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.19. Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023

<b>RM</b>	Rp.	79.661.390.000	100%
<b>PNBP</b>	Rp.		
<b>SBSN</b>	Rp.		
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>79.661.390.000</b>	<b>100,00%</b>

Tabel III.20. Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023

<b>Belanja Pegawai</b>	Rp.		0%
<b>Belanja Barang</b>	Rp.	51.375.543.000	64,49%
<b>Belanja Modal</b>	Rp.	28.285.847.000	36%
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>79.661.390.000</b>	<b>100,00%</b>

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2023 akibat adanya Revisi DIPA di BPTD Kelas II Maluku Utara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar **Rp. 6.574.097.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA BPTD Kelas II Maluku Utara pada Triwulan IV TA. 2023 adalah sebesar **Rp. 86.235.478.000 ,-** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.21. Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2023

<b>RM</b>	Rp.	86.235.478.000	100%
<b>PNBP</b>	Rp.		
<b>SBSN</b>	Rp.		
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>86.235.478.000</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Maluku Utara





Tabel III.22. Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV  
TA. 2023

<b>Belanja Pegawai</b>	Rp.		
<b>Belanja Barang</b>	Rp.	53.582.092.000	62,13%
<b>Belanja Modal</b>	Rp.	32.653.386.000	37,87%
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>86.235.478.000</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Malut

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Kementerian Keuangan tanggal 30 November 2022 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023 (DIPA awal);
- b. Surat Kementerian Keuangan tanggal 27 Desember 2022 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023 (DIPA Revisi I);
- c. Surat Kementerian Keuangan tanggal 9 Februari 2023 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023 (DIPA Revisi II);
- d. Surat Kementerian Keuangan tanggal 24 Maret 2023 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023 (DIPA Revisi III);
- e. Surat Kementerian Keuangan tanggal 17 April 2023 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan





- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023 (DIPA Revisi IV);
- f. Surat Kementerian Keuangan tanggal 19 Juni 2023 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023 (DIPA Revisi V);
  - g. Surat Kementerian Keuangan tanggal 12 Juli 2023 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023 (DIPA Revisi VI);
  - h. Surat Kementerian Keuangan tanggal 1 Agustus 2023 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023 (DIPA Revisi VII);
  - i. Surat Kementerian Keuangan tanggal 7 September 2023 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023 (DIPA Revisi VIII);
  - j. Surat Kementerian Keuangan tanggal 26 September 2023 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023 (DIPA Revisi IX);
  - k. Surat Kementerian Keuangan tanggal 6 Oktober 2023 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai





Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023  
(DIPA Revisi X);

- l. Surat Kementerian Keuangan tanggal 9 Oktober 2023  
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat  
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai  
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023  
(DIPA Revisi XI);
- m. Surat Kementerian Keuangan tanggal 27 Oktober 2023  
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat  
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai  
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023  
(DIPA Revisi XII);
- n. Surat Kementerian Keuangan tanggal 8 November 2023  
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat  
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai  
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023  
(DIPA Revisi XIII);
- o. Surat Kementerian Keuangan tanggal 14 November 2023  
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat  
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai  
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023  
(DIPA Revisi XIV);
- p. Surat Kementerian Keuangan tanggal 27 November 2023  
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat  
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai  
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023  
(DIPA Revisi XV);
- q. Surat Kementerian Keuangan tanggal 7 Desember 2023  
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat  
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai





Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023  
(DIPA Revisi XVI);

- r. Surat Kementerian Keuangan tanggal 27 Desember 2023  
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403866/2023 perihal Surat  
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai  
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2023  
(DIPA Revisi XVII);

### III.3.1.2. Revisi Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 17 (tujuh belas) kali revisi DIPA ,maka berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel III.23. Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2023

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	79.661.390.000			79.661.390.000
REVISI KE-1	79.661.390.000			79.661.390.000
REVISI KE-2	79.661.390.000			79.661.390.000
REVISI KE-3	79.661.390.000			79.661.390.000
REVISI KE-4	79.661.390.000			79.661.390.000
REVISI KE-5	79.661.390.000			79.661.390.000
REVISI KE-6	79.661.390.000			79.661.390.000
REVISI KE-7	79.661.390.000			79.661.390.000
REVISI KE-8	78.853.669.000			78.853.669.000
REVISI KE-9	78.853.669.000			78.853.669.000
REVISI KE-10	88.133.239.000			88.133.239.000
REVISI KE-11	88.133.239.000			88.133.239.000
REVISI KE-12	87.034.549.000			87.034.549.000
REVISI KE-13	86.235.478.000			86.235.478.000
REVISI KE-14	86.235.478.000			86.235.478.000
REVISI KE-15	86.235.478.000			86.235.478.000
REVISI KE-16	86.235.478.000			86.235.478.000
REVISI KE-17	86.235.478.000			86.235.478.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Malut





Tabel III.24. Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2023

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	0	51.375.543.000	28.285.847.000	79.661.390.000
REVISI KE-1	0	51.375.543.000	28.285.847.000	79.661.390.000
REVISI KE-2	0	51.375.543.000	28.285.847.000	79.661.390.000
REVISI KE-3	0	51.375.543.000	28.285.847.000	79.661.390.000
REVISI KE-4	0	51.375.543.000	28.285.847.000	79.661.390.000
REVISI KE-5	0	51.375.543.000	28.285.847.000	79.661.390.000
REVISI KE-6	0	51.375.543.000	28.285.847.000	79.661.390.000
REVISI KE-7	0	51.375.543.000	28.285.847.000	79.661.390.000
REVISI KE-8	0	51.375.543.000	27.478.126.000	78.853.669.000
REVISI KE-9	0	51.375.543.000	27.478.126.000	78.853.669.000
REVISI KE-10	0	57.462.871.828	30.670.367.172	88.133.239.000
REVISI KE-11	0	57.462.871.828	30.670.367.172	88.133.239.000
REVISI KE-12	0	56.034.549.000	30.200.988.503	87.034.549.000
REVISI KE-13	0	53.582.092.000	32.653.386.000	86.235.478.000
REVISI KE-14	0	53.582.092.000	32.653.386.000	86.235.478.000
REVISI KE-15	0	53.582.092.000	32.653.386.000	86.235.478.000
REVISI KE-16	0	53.582.092.000	32.653.386.000	86.235.478.000
REVISI KE-17	0	53.582.092.000	32.653.386.000	86.235.478.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Malut





Tabel III.25. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2023

Jenis Kegiatan	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir Per Triwulan I	Pagu Akhir Per Triwulan II	Perubahan	Pagu Akhir Per Triwulan III	Perubahan	Pagu Akhir Per Triwulan IV
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang	51.375.543.000	0	51.375.543.000	51.375.543.000	0	51.375.543.000	2.206.549.000	53.582.092.000
· RM	51.375.543.000	0	51.375.543.000	51.375.543.000	0	51.375.543.000	2.206.549.000	53.582.092.000
· PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal	28.285.847.000	0	28.285.847.000	28.285.847.000	807.721.000	27.478.126.000	5.175.260.000	32.653.386.000
· RM	28.285.847.000	0	28.285.847.000	28.285.847.000	807.721.000	27.478.126.000	5.175.260.000	32.653.386.000
· PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0
· SBSN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>79.661.390.000</b>	<b>0</b>	<b>79.661.390.000</b>	<b>79.661.390.000</b>	<b>807.721.000</b>	<b>78.853.669.000</b>	<b>2.273.809.000</b>	<b>86.235.478.000</b>

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Malut

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):





Tabel III.26. Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2023

Nomenklatur Program	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir Per Triwulan I	Pagu Akhir Per Triwulan II	Perubahan	Pagu Akhir Per Triwulan III	Perubahan	Pagu Akhir Per Triwulan IV
BPTD Kelas II Maluku Utara	79.661.390.000	0	79.661.390.000	79.661.390.000	807.721.000	78.853.669.000	7.381.809.000	86.235.478.000
<b>Program Infrastruktur Konektivitas</b>	<b>58.454.741.000</b>	<b>0</b>	<b>58.454.741.000</b>	<b>58.454.741.000</b>	<b>0</b>	<b>58.454.741.000</b>	<b>0</b>	<b>65.836.550.000</b>
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	33.125.071.000	0	33.125.071.000	33.125.071.000	0	33.125.071.000	1.664.651.000	31.460.420.000
Pelayanan Transportasi Darat	3.176.260.000	0	3.176.260.000	3.176.260.000	0	3.176.260.000	0	3.176.260.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	18.246.549.000	0	18.246.549.000	18.246.549.000	0	18.246.549.000	9.046.460.000	27.293.009.000
Penunjang Teknis Transportasi Darat	3.906.861.000	0	3.906.861.000	3.906.861.000	0	3.906.861.000	0	3.906.861.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>21.206.649.000</b>	<b>0</b>	<b>21.206.649.000</b>	<b>21.206.649.000</b>	<b>807.721.000</b>	<b>20.398.928.000</b>	<b>0</b>	<b>20.398.928.000</b>
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	21.206.649.000	0	21.206.649.000	21.206.649.000	807.721.000	20.398.928.000	0	20.398.928.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat								

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Malut

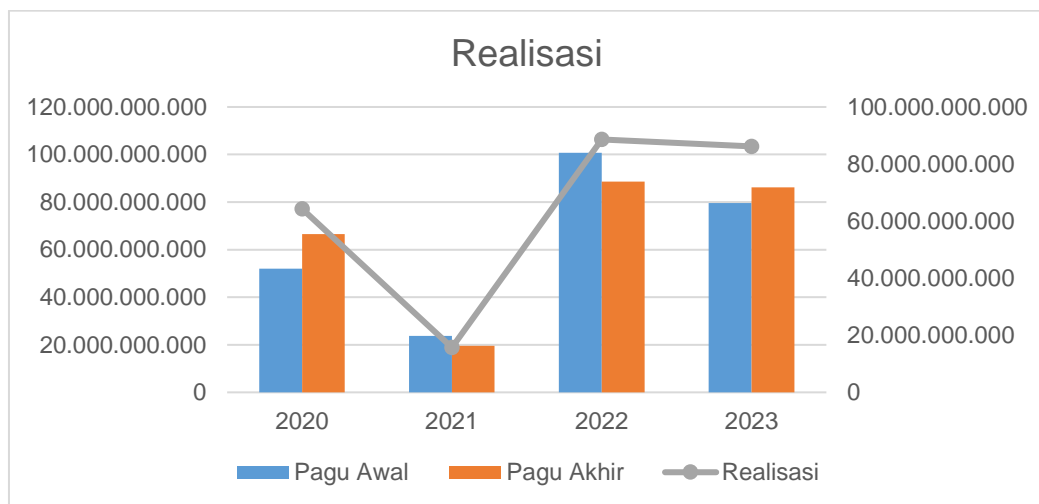


### III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.27. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2023

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	51.974.754.000	66.499.639.000	64.337.883.624	96,75%
2	2021	23.777.845.000	19.615.883.000	15.699.113.726	80.03%
3	2022	100.799.785.000	88.649.119.000	88.612.845.390	99.96%
4	2023	79.661.390.000	86.235.478.000	86.188.474.909	99,95%



Gambar III.3. Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun **2020** anggaran yang terserap sebesar Rp. 64.337.883.624- atau mencapai 96,75% dari pagu akhir Rp. 513.547.000,-. pada tahun **2021** anggaran yang terserap sebesar Rp. 15.699.113.726,- atau mencapai 80,03% dari pagu akhir Rp. 19.615.883.000,-. pada tahun **2022** anggaran yang terserap sebesar Rp. 88.612.845.390,- atau mencapai 99,96% dari pagu akhir Rp. 88.649.119.000,-. pada tahun **2023** anggaran yang terserap sebesar Rp. 86.188.474.909,- atau mencapai 99,95% dari pagu akhir Rp. 86.235.478.000,-.





### III.3.2. Realisasi Anggaran

#### III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III.28. Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

Kode	Nomenklatur Program	Pagu Awal	Pagu Per Triwulan I	Triwulan I		Pagu Per Triwulan II	Triwulan II		Pagu Per Triwulan III	Triwulan III		Pagu Per Triwulan IV	Pagu TW IV	
				Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%
022.03	BPTD Kelas II Malut	79.661.390.000	79.661.390.000	19.498.854.965	24,48	79.661.390.000	28.540.200.608	35,83	78.853.669.000	51.719.905.170	65	86.235.478.000	86.188.474.909	99,95
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	58.454.741.000	58.454.741.000	8.392.990.912	14	58.454.741.000	7.709.565.300	15	58.454.741.000	37.899.254.549	64,8	65.836.550.000	65.793.349.221	99,93
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	33.125.071.000	33.125.071.000	3.287.063.860	10	33.125.071.000	8.392.990.912	25	33.125.071.000	17.103.028.127	51,6	31.460.420.000	31.448.847.897	99,96
4638	Pelayanan Transportasi Darat	3.176.260.000	3.176.260.000	1.004.132.700	32	3.176.260.000	1.860.041.520	58,56	3.176.260.000	2.380.727.740	75	3.176.260.000	3.176.258.581	99,99
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	18.246.549.000	18.246.549.000	4.461.041.300	25	18.246.549.000	6.795.916.950	37,24	18.246.549.000	14.940.149.880	81,8	27.293.009.000	27.261.389.130	99,88
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	3.906.861.000	3.906.861.000	1.418.813.731	36	3.906.861.000	2.663.168.420	68,16	3.906.861.000	3.475.348.802	88,9	3.906.861.000	3.906.853.613	99,99
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	21.206.649.000	21.206.649.000	2.667.787.743	13	21.206.649.000	10.141.508.418	47,82	20.398.928.000	13.820.650.621	67,7	20.398.928.000	20.395.125.688	99,99
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	21.206.649.000	21.206.649.000	2.667.787.743	13	21.206.649.000	10.141.508.418	47,82	20.398.928.000	13.820.650.621	67,7	20.398.928.000	20.395.125.688	99,99

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 86.188.474.909,-** atau mencapai 99,95% dari pagu akhir **Rp. 86.235.478.000,-**.





### III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.29. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Alokasi Awal	Realisasi Tw I		Realisasi Tw II		Pagu Alokasi TW III	Realisasi TW III		Pagu Alokasi TW IV	Realisasi TW IV	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	
1	Belanja Pegawai											
2	Belanja Barang	51.375.543.000	11.571.732.755	22,87	17.350.729.998	33,77	51.375.543.000	30.983.831.369	60,31	53.582.092.000	53.536.996.059	99,99
3	Belanja Modal	28.285.847.000	7.747.122.210	27,39	11.189.470.610	39,56	27.478.126.000	20.736.073.758	75,46	32.653.386.000	32.651.478.850	99,99
<b>TOTAL</b>		<b>79.661.390.000</b>	<b>19.498.854.965</b>	<b>24,48</b>	<b>28.540.200.608</b>	<b>35,83%</b>	<b>78.853.669.000</b>	<b>51.719.905.127</b>	<b>65,59</b>	<b>86.235.478.000</b>	<b>86.188.474.909</b>	<b>99,99</b>

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2023 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I realisasi hanya sebesar 24,48% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 35,83% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 65,59 serta pada Triwulan IV yaitu mencapai 99,99%.

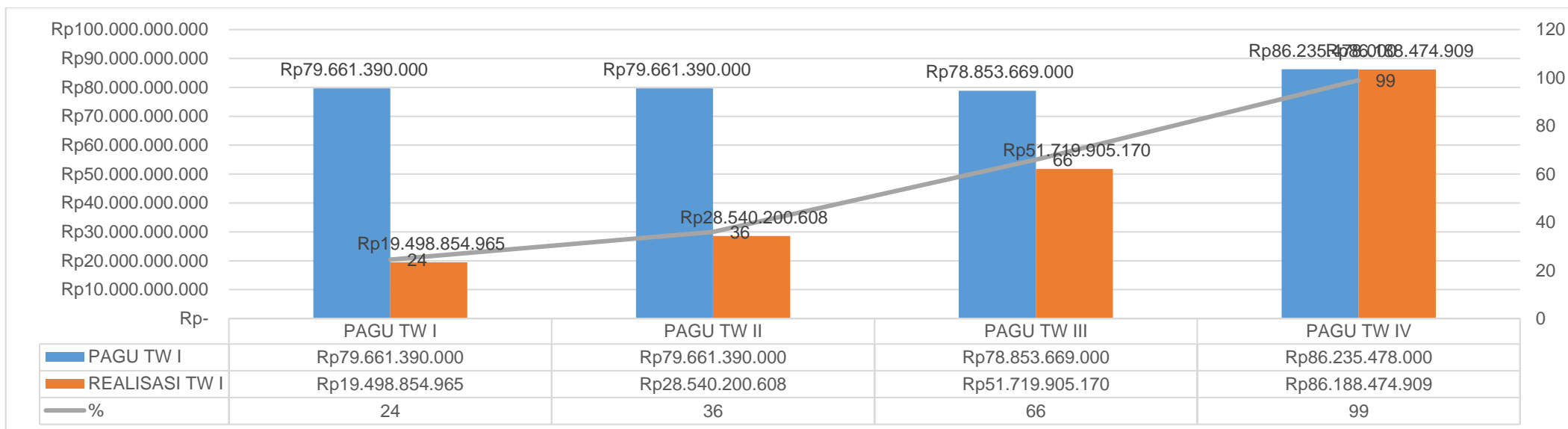


### III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.30. Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana 2023

No	Sumber Dana	Pagu Alokasi TW I	Realisasi Tw I		Pagu Alokasi TW II	Realisasi Tw II		Pagu Alokasi TW III	Realisasi Tw III		Pagu Alokasi TW IV	Realisasi TW IV	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	RM	79.661.390.000	19.498.854.965	24,48	79.661.390.000	28.540.200.608	35,83	78.853.669.000	51.719.905.170	65	86.235.478.000	86.188.474.909	99,99
2	PNBP	0	0	0									
3	SBSN	0	0	0									
<b>TOTAL</b>		<b>79.661.390.000</b>	<b>19.498.854.965</b>	<b>24,48</b>		<b>28.540.200.608</b>	<b>35,83</b>	<b>78.853.669.000</b>	<b>51.719.905.170</b>	<b>65</b>	<b>86.235.478.000</b>	<b>86.188.474.909</b>	<b>99,99</b>



Gambar III.4. Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Tahun 2023





Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2023 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I itu realisasi hanya sebesar 24% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 36% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 66% kemudian mengalami peningkatan kembali pada Triwulan IV yaitu mencapai sebesar 99,9%

### III.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.31. Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Barang	53.582.092.000	53.536.996.059	45.095.941
3	Belanja Modal	32.653.386.000	32.651.478.850	1.907.150
<b>TOTAL</b>				

Tabel III.32. Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	86.235.478.000	86.188.474.909	47.003.091
2	PNBP			
3	SBSN			
<b>TOTAL</b>		86.235.478.000	86.188.474.909	47.003.091

Tabel III.33. Rincian sisa Anggaran Tahun 2023

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA ANGGARAN
		Rp.	Rp.	
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana		-	
2	Kegiatan yang Terblokir	1.098.690.000	0	
3	Sisa Kontraktual		-	16.629.770
	a. Belanja Barang		-	15.112.620
	b. Belanja Modal		-	1.517.150
4	Sisa Non Kontraktual		-	30.372.321
	a. Belanja Barang		-	29.982.321
	b. Belanja Modal		-	390.000
5	Sisa Belanja Pegawai			
<b>TOTAL</b>				<b>94.004.182</b>



Dari total pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara sebesar 86.235.478.000,- (Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp 86.188.474.909,- (Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) atau sebesar 99,99% sehingga total dana yang tidak terserap di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara adalah sebesar Rp 94.004.182,- (Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Ada Kegiatan yang terblokir;
3. Sisa Kontraktual sebesar Rp 16.629.770,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujubh Puluh Rupiah)
  - a. Sisa belanja modal sebesar Rp. 1.517.150,- berasal dari sisa kontrak yang sudah tidak dapat di realokasi dikarenakan mengacu pada PMK tentang tata cara revisi (untuk revisi DIPA antar sumber belanja dan jenis belanja merupakan wewenang DJA yang maksimal pengajuan hanya sampai 31 Oktober), sedangkan sisa belanja modal baru diketahui saat akhir tahun;
  - b. Sisa belanja barang sebesar Rp. 15.112.620,- berasal dari beberapa ritase subsidi yang tidak tercapai;
4. Sisa Non Kontraktual sebesar Rp. 30.372.321,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
  - 1) Sisa belanja modal sebesar Rp 390.000,- berasal dari sisa kegiatan belanja Peralatan dan mesin pada satuan pelayanan pelabuhan;
  - 2) Sisa belanja barang sebesar Rp 29.982.321,- berasal dari sisa kegiatan operasional serta penunjang pada tiap satker;





### III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I

– IV Tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.34. Efisiensi anggaran

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran (%)	C.Keu (%)	Efisiensi TW I	Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran (%)	C.Keu (%)	Efisiensi TW II	Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran (%)	C.Keu (%)	Efisiensi TW III	Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran (%)	C.Keu (%)	Efisiensi TW IV
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	49	4,53	44,47	67	21,37	45,63	83,33	51,63	31,7	96,33	99,93	3,6
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	46,6	28,37	18,23	65	54,61	10,39	75	71	4	100	99,99	0,01
3	SK3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	25	22,75	2,25	41,37	37,02	4,35	100	81,75	18,25	100	99,88	0,12
4	SK4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	100	33,82	68,18	100	68,17	31,83	100	88,96	11,04	100	99,99	0,01
5	SK5	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	100	32,20	67,8	100	48,94	51,06	100	67,32	32,68	100	99,99	0,01
<b>Total Rata Rata</b>			<b>64,12</b>	<b>24,33</b>	<b>43,75</b>	<b>63,50</b>	<b>47</b>	<b>28,65</b>	<b>91,66</b>	<b>65,29</b>	<b>19,53</b>	<b>99,27</b>	<b>99,97</b>	<b>3,75</b>

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,27%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,97% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 0,7%.



#### **III.3.4. Hambatan dan Kendala**

Terdapat beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang mana tugas dan fungsinya di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.
2. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran.
3. Dalam Kegiatan kontrak, faktor cuaca/ faktor alam tidak menentu yg menjadikan kendala dalam pelaksanaannya.





## **BAB IV**

# **PENUTUP**

### **IV. Ringkasan Capaian**

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.





Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja TW IV Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2024 ini terdapat 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja yang capaiannya telah/lebih dari target yang telah ditentukan yaitu:
  1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan nasional;
  2. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan;
  3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi;
  4. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
  5. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  6. Persentase Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang;
  7. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi;
  8. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran;
  9. Kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat;
  10. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat;
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA**



## IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	Tahun 2024			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					T	R	C			
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	90	90	90	100%	Tercapai	Menyediakan sarana angkutan yang lebih baik dan memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Seksi Lalu Sarana
		IKK 1.5 Presentasi pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100%	Tercapai	Melaksanakan Evaluasi subsidi angkutan penyeberangan di wilayah maluku utara.	Seksi Lalu Lintas
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	20	20	20	100%	Tercapai	Meningkatkan pelayanan pada pelabuhan penyeberangan.	Seksi Prasarana
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.3 Presentasi pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100	100%	Tercapai	Berkoordinasi dengan operator Pelabuhan terkait hasil pemeriksaan SPM pelabuhan penyeberangan untuk ditindaklanjuti kekurangan dan meningkatkan fasilitas pelayanan pada pelabuhan penyeberangan	Seksi Prasarana

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	Tahun 2024			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					T	R	C			
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100%	100%	100%	Tercapai	Melaksanakan monitoring dan pengawasan secara berkala serta melakukan inventaris fasilitas	Seksi Lalu Lintas
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	100	100	100%	Tercapai	Melaksanakan Evaluasi dan peningkatan sosialisasi di tahun berikutnya	Seksi Sarana
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	100	100	Tercapai	Pemanfaatan peminjaman alat pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan bermotor nonstatis kepada UPUPKB yang belum menyelenggarakan pengujian	Seksi Sarana
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	4	4	4	100	Tercapai	Melaksanakan Monitoring dan pengawasan fasilitas SBNP secara berkala	Seksi Lalu Lintas
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	90	90	Tercapai	Membuat timeline target penyelenggaraan dukungan teknis BPTD .	Tata Usaha
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	80	100	Tercapai	Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	Tata Usaha



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA**

